



LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PER 31 DESEMBER 2023 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS



PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN CIAMIS

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji sukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 telah selesai disusun. Laporan Keuangan Akhir Tahun ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan per 31 Desember 2023, diketahui total realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 96.199.144.403,00 atau mencapai 91,82% dibandingkan dengan total anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 104.768.862.525. Sedangkan apabila dibandingkan dengan total anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 84.557.321.920,00 maka realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 mencapai 113,77% dan apabila dibandingkan dengan total realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 83.510.600.481,00 mencapai 115,19%.

Neraca Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis menyajikan informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 22.932.276.613,99 atau turun 59,97% yaitu sebesar (Rp. 34.348.344.295,29) dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 57.280.620.909,28.

Neraca per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari aset lancar Rp. 93.441.200,00; aset tetap Rp. 22.815.752.996,09; aset lainnya sebesar Rp. 23.082.417,90,00 dan selanjutnya dari sisi kewajiban dan ekuitas sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.685.947.689,00 yaitu terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek/Utang belanja jasa kantor dan ekuitas sebesar Rp. 21.246.328.924,99

Demikian Kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun per 31 Desember 2023 ini dapat memberikan penjelasan menjadi informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, sesuai tata kelola sistem keuangan pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis/Peraturan Perundangan yang berlaku.

Ciamis, 31 Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderai Sudirman No. 16 Telp. (0265) 771511 Ciamis

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 disusun menggunakan kebijakan akuntansi berbasis akrual. Adapun komponen Laporan Keuangan tersebut terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Operasional
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- d. Neraca, dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Semesteran Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami, Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai Keputusan Bupati Ciamis.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ciamis, 31 Januari 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PER 31 DESEMBER 2023	
1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Per 31 Desember 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	
2. Neraca Komparatif Per 31 Desember 2023 Dan Per 31 Desember 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	
3. Laporan Operasional (LO)	
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
5. Catalan Atas Laporan Keuangan (CALK) Per 31 Desember 2023	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	7
2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	23
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	25
3.1 Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
3.1.1 Pendapatan-LRA	25
3.1.2 Belanja Operasi-LRA	26
3.1.2.1 Belanja Pegawai	27
3.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa	29
3.1.2.3 Belanja Hibah	31
3.1.2.4 Belanja Modal	32
3.2 Penjelasan Pos-PoS Dalam Neraca	33
3.2.1 Aset	33
3.2.1.1 Aset Lancar	33
3.2.1.2 Aset Tetap	34
3.2.1.3 Aset Lainnya	41

3.2.2	Kewajiban	54
3.2.3	Ekuitas	56
3.3	Penjelasan Atas Pop-Pos Laporan Operasional	56
3.3.1	Pendapatan LO	56
3.3.2	Beban LO	57
3.4	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	71
3.4.1	Ekuitas Awal	72
3.4.2	RK PPKD	72
3.4.3	RK Barang	72
3.4.4	Surplus (Defisit) LO	74
3.4.5	Ekuitas Akhir	75
BAB IV	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	76
4.1	Kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	76
4.2	Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	76
4.3	Fungsi	77
4.4	Struktur Organisasi	77
4.5	Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	78
4.6	Hal Lain Yang Dianggap Penting	79
BAB V	PENUTUP	80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Neraca

- 1.1 Kas
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Kas Per 31 Desember 2023
 - b. Register Penutupan Kas Per 31 Desember 2023
 - c. Berita Acara Rekonsiliasi Bank Per 31 Desember 2023
- 1.2 Persediaan
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Per 31 Desember 2023
 - b. Laporan Persediaan Per 31 Desember 2023
- 1.3 Aset Tetap
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023
 - b. Lampiran Rekonsiliasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023
 - c. Daftar Penjelasan Tambah Kurang Mutasi Tetap Per 31 Desember 2023
 - d. Rekapitulasi Barang Ke Neraca Per 31 Desember 2023
 - e. Daftar Pengadaan Barang Dan Jasa Per 31 Desember 2023

- f. Daftar Rekapitulasi Aset/Ekstra Komptable Per 31 Desember 2023
- g. Rekapitulasi Kib A, B, C, D, E, F Per 31 Desember 2023
- h. Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023
- i. Lampiran Berita Acara Serah Terima Aset (Mutasi Masuk Dan Keluar) 31 Desember 2023
- j. SK Penghapusan Aset Lain-lain Hasil Inventarisasi Per 31 Desember 2023

1.4 Aset Lainnya

- a. Piutang BPR/BKPD/LPK/BBKU Per 31 Desember 2023

1.5 Lampiran Lain-Lain

- a. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Per 31 Desember 2023
- b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023
- c. Register SP2D Per 31 Desember 2023
- d. Register Cp (Kontra Pos) Per 31 Desember 2023
- e. Register Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Per 31 Desember 2023

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2023 telah mengacu ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2023 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 4 (empat) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Organisasi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan akhir tahun yang meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi kewajiban yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun pelaporan.
- c. Menyajikan Informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi serta pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber dana

Sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dilaksanakan, meliputi :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Estándar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;

- m. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- n. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15B Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- q. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.
- s. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- t. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023
- u. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III Penjelasan Pos-pos laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan-LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas

BAB IV Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB V Penutup

2.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

2.1.1. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas

Adapun uraian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %
SEKRETARIAT DAERAH	104.768.862.525	96.199.144.403	8.569.718.122	91,82
1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	62.008.906.670	55.416.687.607	6.592.219.063	89,37
<i>1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>639.397.000</i>	<i>639.397.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
1 Penataan Administrasi Pemerintahan	272.190.000	272.190.000	0	100,00
2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya	142.359.000	142.359.000	0	100,00
3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	224.848.000	224.848.000	0	100,00
<i>2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>55.840.334.770</i>	<i>49.248.899.202</i>	<i>6.591.435.568</i>	<i>88,20</i>
4 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	55.457.371.020	48.866.225.500	6.591.145.520	88,11
5 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	260.533.750	260.303.702	230.048	99,91
6 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	122.430.000	122.370.000	60.000	99,95

3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5.338.912.400	5.338.129.243	783.157	99,99
7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.345.360.000	1.345.355.600	4.400	100,00
8	Fasilitasi Bantuan Hukum	852.705.000	852.053.893	651.107	99,92
9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	3.140.847.400	3.140.719.750	127.650	100,00
4	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	190.262.500	190.262.162	338	100,00
10	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	190.262.500	190.262.162	338	100,00
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.599.468.500	1.539.502.178	59.966.322	96,25
5	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	475.097.000	464.741.500	10.355.500	97,82
11	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	234.215.000	232.099.800	2.115.200	99,10
12	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	153.064.500	148.220.200	4.844.300	96,84
13	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	33.410.000	30.014.000	3.396.000	89,84
14	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	54.407.500	54.407.500	0	100,00
6	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	421.349.000	418.881.000	2.468.000	99,41
15	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	143.490.000	143.490.000	0	100,00
16	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	112.282.000	111.048.000	1.234.000	98,90
17	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	165.577.000	164.343.000	1.234.000	99,25
7	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	541.302.500	531.149.863	10.152.637	98,12
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	221.588.500	221.058.500	530.000	99,76
19	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	185.534.000	175.981.363	9.552.637	94,85
20	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	134.180.000	134.110.000	70.000	99,95
8	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	161.720.000	124.729.815	36.990.185	77,13
21	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	131.000.000	96.104.500	34.895.500	73,36
22	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	16.000.000	15.913.800	86.200	99,46
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	14.720.000	12.711.515	2.008.485	86,36
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.160.487.355	39.242.954.618	1.917.532.737	95,34
9	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.660.600	202.205.750	454.850	99,78
24	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.888.100	92.449.850	438.250	99,53
25	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.530.000	24.527.500	2.500	99,99

	26 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.250.000	17.249.400	600	100,00
	27 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.862.500	20.857.000	5.500	99,97
	28 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.250.000	17.247.000	3.000	99,98
	29 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.880.000	29.875.000	5.000	99,98
10	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.954.802.933	18.187.471.508	1.767.331.425	91,14
	30 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.641.582.233	17.874.672.008	1.766.910.225	91,00
	31 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.430.700	124.089.700	341.000	99,73
	32 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	134.195.000	134.157.500	37.500	99,97
	33 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.175.000	29.138.850	36.150	99,88
	34 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	25.420.000	25.413.450	6.550	99,97
11	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	53.195.165	53.168.500	26.665	99,95
	35 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.285.000	17.268.000	17.000	99,90
	36 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.910.165	35.900.500	9.665	99,97
12	Kegiatan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	377.305.000	376.915.000	390.000	99,90
	37 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.405.000	11.405.000	0	100,00
	38 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	207.900.000	207.900.000	0	100,00
	39 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	158.000.000	157.610.000	390.000	99,75
13	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.485.182.115	6.478.359.664	6.822.451	99,89
	40 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.000.000	49.000.000	0	100,00
	41 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	253.549.000	253.284.000	265.000	99,90
	42 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	645.305.500	642.675.137	2.630.363	99,59
	43 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	912.190.000	912.190.000	0	100,00
	44 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	163.100.000	159.575.000	3.525.000	97,84
	45 Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.164.355.000	3.164.244.300	110.700	100,00
	46 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.225.682.615	1.225.391.227	291.388	99,98
	47 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72.000.000	72.000.000	0	100,00
14	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	401.300.000	400.300.000	1.000.000	99,75

48	Pengadaan Mebel	10.000.000	10.000.000	0	100,00
49	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.000.000	59.000.000	0	100,00
50	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.300.000	232.300.000	1.000.000	99,57
51	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.000.000	99.000.000	0	100,00
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.879.661.200	2.815.979.354	63.681.846	97,79
52	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.303.000	3.302.400	600	99,98
53	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	934.718.200	873.506.002	61.212.198	93,45
54	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.941.640.000	1.939.170.952	2.469.048	99,87
16	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.050.240.200	4.046.136.150	4.104.050	99,90
55	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.285.602.300	1.285.591.300	11.000	100,00
56	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.856.209.900	1.852.834.400	3.375.500	99,82
57	Pemeliharaan Mebel	46.150.000	46.000.000	150.000	99,67
58	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.750.000	43.300.000	450.000	98,97
59	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	328.400.000	328.385.950	14.050	100,00
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.628.000	253.524.500	103.500	99,96
61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.500.000	236.500.000	0	100,00
17	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.631.800.892	1.590.273.426	41.527.466	97,46
62	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.321.260.892	1.279.964.846	41.296.046	96,87
63	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	185.540.000	185.314.000	226.000	99,88
64	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	125.000.000	124.994.580	5.420	100,00
18	Kegiatan Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	2.361.489.000	2.361.119.884	369.116	99,98
65	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.048.374.000	1.048.246.725	127.275	99,99
66	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	879.500.000	879.368.165	131.835	99,99

67	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	433.615.000	433.504.994	110.006	99,97
19	Kegiatan Penataan Organisasi	890.116.000	859.001.882	31.114.118	96,50
68	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	263.712.500	236.644.458	27.068.042	89,74
69	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	243.964.250	243.085.250	879.000	99,64
70	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	137.893.750	135.342.674	2.551.076	98,15
71	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	185.478.750	184.862.750	616.000	99,67
72	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	59.066.750	59.066.750	0	100,00
20	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.872.734.250	1.872.023.500	710.750	99,96
73	Fasilitasi Keprotokolan	451.132.750	450.992.750	140.000	99,97
74	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	43.100.000	43.100.000	0	100,00
75	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.378.501.500	1.377.930.750	570.750	99,96

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk Tahun 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 41.160.487.355 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 39.242.954.618 atau 95,34% sehingga terdapat sisa pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.917.532.737.

b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Anggaran untuk Tahun 2023 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 62.008.906.670 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 55.416.687.607 atau 89,37% sehingga terdapat sisa pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.592.219.063.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Anggaran untuk Tahun 2023 Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp. 1.599.468.500 realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 1.539.502.178 atau 96,25%, sehingga terdapat sisa pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 59.966.322.

Adapun capaian kinerja (keluaran) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Capaian Kinerja Kegiatan,
Sekretariat Daerah per 31 Desember 2023

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				CAPAIAN
	NARASI	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	100	100	100
	Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	100	108,67	108,67
	Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	100	100
1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	persentase kegiatan tata pemerintahan yang terfasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	%	100	100	100
1 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan.	Dokumen	1	1	100
2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya.	Dokumen	2	2	100
3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Dokumen	2	2	100
2 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi dan dilaksanakan	%	100	100	100
4 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	23	23	100
5 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	12	12	100

6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	9	9	100
3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Percentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron	%	100	108,67	108,67
7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	700	791	113
8	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	12	12	100
9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	700	791	113
4	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama	Dokumen	1	1	100
10	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Dokumen	1	1	100
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Percentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan	%	100	100	100
		Percentase rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada PD	%	100	100	100
		Percentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa	%	100	116,6	116,6
5	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	4	4	100
11	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	1	100
12	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	1	100
13	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	1	100
14	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	dokumen	1	1	100

		Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Program Pembangunan	dokumen	2	2	100
6	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian Pembangunan	Dokumen	10	10	100
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	24	24	100,00
15	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	100
16	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan hasil koordinasi pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	24	24	100
17	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	24	24	100
7	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa	%	100	116,60	116,60
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	700	783	111,86
19	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	12	100
20	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	290	400	137,93
8	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan kebijakan bidang SDA yang ditetapkan	dokumen	3	3	100
21	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	100
22	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	1	100
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	1	100

3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	82,42	84,43	102,44
	Kualitas Pelaporan Keuangan	Nilai	800	833,43	104,18
	Indeks Kepuasan Masyarakat Setda	Nilai	88,29	88,37	100,09
	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100
9 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja SETDA	Dokumen	9	9	100
24 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	100
25 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen	1	1	100
26 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen	1	1	100
27 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dokumen	1	1	100
28 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	1	100
29 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100
10 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan yang disusun	dokumen	26	26	100
30 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	14	100
31 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
32 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	100
33 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100
11	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Kegiatan Pengelolaan BMD yang Dilaksanakan	Laporan	12	12	100
34	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100
35	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100
12	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Bulan	12	12	100
36	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	4	100
37	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	100
38	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	4	100
13	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan dan kebutuhan administrasi umum yang difasilitasi	Bulan	12	12	100
40	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100
41	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	35	35	100
42	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	104	104	100
43	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	16	100
44	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	23	23	100
45	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100
46	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100
47	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	100

14	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah	Bulan	12	12	100
48	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	5	100
49	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100
50	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	100
51	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	3	3	100
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100
52	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
53	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
54	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
16	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	12	12	100
55	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	100
56	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinnnya	Unit	72	72	100
57	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	8	100
58	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2	100
59	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	5	100

	61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	7	7	100
17	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	Bulan	12	12	100	
	62	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	14	14	100
	63	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	23	23	100
	64	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	4	4	100
18	Kegiatan Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah jabatan yang terpelihara, jumlah makanan dan minuman harian KDH dan WKDH dan jumlah perjalanan dinas KDH, WKDH, Sekda	Bulan	12	12	100	
	65	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100
	66	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100
	67	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100
19	Kegiatan Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	Nilai	40,36	40,36	100	
	68	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	31	31	100
	69	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	5	5	100
	70	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	8	8	100
	71	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	4	4	100
	72	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	dokumen	1	1	100

20	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	Bulan	12	12	100
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Prokopim	Laporan	36	36	100
73	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12	100
74	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	1	100
75	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	12	100

2.1.2. Perbandingan Realisasi Antar Periode

2.1.2.1 Pendapatan

Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat anggaran maupun realisasi pendapatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

2.1.2.2 Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		2022
			2023	%	
5.	BELANJA DAERAH	104.768.862.525,00	96.199.144.403,00	91,82	83.510.600.481,00
5.1.	BELANJA OPERASI	104.383.879.125,00	95.825.040.533,00	91,80	82.125.297.641,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	20.974.283.125,00	19.166.076.854,00	91,38	18.859.406.071,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.081.820.652,00	8.983.470.714,00	98,92	9.146.985.718,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	6.605.031.531,00	6.572.384.000,00	99,51	6.675.494.000,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	646.978.148,00	641.404.172,00	99,14	662.690.196,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	525.539.500,00	522.680.000,00	99,46	526.550.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	55.596.600,00	54.240.000,00	97,56	26.068.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	231.019.350,00	229.500.000,00	99,34	242.990.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	399.276.142,00	395.268.360,00	99,00	415.980.480,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.003.193,00	14.938.090,00	99,57	13.704.081,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	110.613,00	97.387,00	88,04	96.169,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	548.703.431,00	499.201.403,00	90,98	528.636.906,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.640.509,00	13.439.297,00	98,52	13.693.933,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	40.921.635,00	40.318.005,00	98,52	41.081.953,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.559.761.581,00	8.891.201.294,00	84,20	8.919.631.325,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.102.322.848,00	3.452.748.000,00	84,17	2.561.056.468,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.078.525.193,00	906.347.500,00	84,04	1.569.835.085,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.378.913.540,00	4.532.105.794,00	84,26	4.788.739.772,00

5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.440.000,00	11.440.000,00	100,00	21.520.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	11.440.000,00	11.440.000,00	100,00	21.520.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	721.260.892,00	679.964.846,00	94,27	171.269.028,00
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.873.000,00	54.600.000,00	99,50	54.600.000,00
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.500.340,00	6.468.000,00	99,50	6.468.000,00
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.771.400,00	98.280.000,00	99,50	98.280.000,00
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.677.004,00	5.648.760,00	99,50	5.214.240,00
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	804.313,00	800.311,00	99,50	793.428,00
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	804,00	800,00	99,50	720,00
5.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.490.677,00	5.463.360,00	99,50	5.463.360,00
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.882,00	112.320,00	99,50	112.320,00
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	338.645,00	336.960,00	99,50	336.960,00
5.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	492.177.968,00	492.177.965,00	100,00	-
5.1.01.05.11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	56.513.859,00	16.076.370,00	28,45	-
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.438.596.000,00	29.278.463.679,00	99,46	27.516.021.370,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	10.677.357.250,00	10.651.975.901,00	99,76	9.823.536.816,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	10.677.357.250,00	10.651.975.901,00	99,76	9.812.646.816,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	10.890.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	10.660.407.200,00	10.567.286.297,00	99,13	10.622.942.247,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	8.972.970.200,00	8.887.911.434,00	99,05	8.502.312.247,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	112.680.000,00	112.680.000,00	100,00	121.260.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.064.990.000,00	1.061.287.613,00	99,65	767.970.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	320.767.000,00	320.737.800,00	99,99	331.045.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.000.000,00	24.983.450,00	99,93	82.398.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	701.099.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	164.000.000,00	159.686.000,00	97,37	116.858.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.368.678.000,00	2.364.609.915,00	99,83	3.209.826.482,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.659.650.000,00	1.655.690.700,00	99,76	1.719.070.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	646.028.000,00	645.927.000,00	99,98	1.401.759.272,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.000.000,00	62.992.215,00	99,99	88.997.210,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	5.412.153.550,00	5.374.591.566,00	99,31	3.479.715.825,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.412.153.550,00	5.374.591.566,00	99,31	3.479.715.825,00

5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00	380.000.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00	380.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	53.971.000.000,00	47.380.500.000,00	87,79	35.749.870.200,00
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	53.871.000.000,00	47.280.500.000,00	87,77	35.649.870.200,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	53.871.000.000,00	47.280.500.000,00	87,77	35.649.870.200,00
5.2.	BELANJA MODAL	384.983.400,00	374.103.870,00	97,17	1.385.302.840,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.983.400,00	374.103.870,00	97,17	1.150.278.300,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	10.700.000,00	10.689.250,00	99,90	7.913.500,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	10.700.000,00	10.689.250,00	99,90	7.913.500,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	75.540.000,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	75.540.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	89.880.000,00	87.925.200,00	97,83	434.300.550,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	209.958.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	79.880.000,00	77.925.200,00	97,55	224.342.550,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	128.903.400,00	128.694.670,00	99,84	188.937.450,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	114.507.600,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	63.903.400,00	63.894.670,00	99,99	74.429.850,00
5.2.02.06.03.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	65.000.000,00	64.800.000,00	99,69	-
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	3.000.000,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	-	-	-	3.000.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	155.500.000,00	146.794.750,00	94,40	431.928.800,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	107.000.000,00	104.294.750,00	97,47	360.130.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	48.500.000,00	42.500.000,00	87,63	71.798.800,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	8.658.000,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	-	-	-	8.658.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	235.024.540,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	235.024.540,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	235.024.540,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(104.768.862.525,00)	(96.199.144.403,00)	91,82	(83.510.600.481,00)

2.1.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan khusus bagi SKPKD, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis tidak berkompeten dalam hal Pembiayaan.

2.1.3. Rasio pos-pos Belanja Daerah

2.1.3.1 Rasio-rasio Belanja Operasi

No	Rasio-rasio Belanja Daerah	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1	Belanja Operasi Total Belanja	$\frac{95.825.040.533,00}{96.199.144.403,00} \times 100\% =$	99,61	98,34	1,27
2	Belanja Pegawai Total Belanja	$\frac{19.166.076.854,00}{96.199.144.403,00} \times 100\% =$	19,92	22,58	-2,66
3	Belanja Pegawai Belanja Operasi	$\frac{19.166.076.854,00}{95.825.040.533,00} \times 100\% =$	20,00	22,96	-2,96
4	Belanja Barang dan Jasa Total Belanja	$\frac{29.278.463.679,00}{96.199.144.403,00} \times 100\% =$	30,44	32,95	-2,51
5	Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasi	$\frac{29.278.463.679,00}{95.825.040.533,00} \times 100\% =$	30,55	33,5	-2,95
6	Belanja Hibah Total Belanja	$\frac{47.380.500.000,00}{96.199.144.403,00} \times 100\% =$	49,25	42,81	6,44
7	Belanja Hibah Belanja Operasi	$\frac{47.380.500.000,00}{95.825.040.533,00} \times 100\% =$	49,44	43,53	5,91

Dari total realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 96.199.144.403,00 paling besar terserap oleh realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 95.825.040.533,00 yaitu sebesar 99,61% atau naik sebesar 1,27% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 98,34%. Dari total Belanja Operasi sebesar Rp. 95.825.040.533,00 sebagian besar terserap oleh realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar 30,55%, Belanja Pegawai 20,00% serta Belanja Hibah sebesar 49,44%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja total sebesar Rp. 96.199.144.403,00 sebagian besar terserap oleh realisasi belanja Barang dan Jasa 30,44% , belanja hibah 49,25% serta Belanja Pegawai 19,92%.

2.1.3.2 Rasio-rasio Belanja Modal

No	Rasio-rasio Belanja Daerah	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1	Belanja Modal Total Belanja	$\frac{374.103.870,00}{96.199.144.403,00} \times 100\% =$	0,39	1,66	-1,27
2	Belanja Modal Tanah Belanja Modal	$\frac{-}{374.103.870,00} \times 100\% =$	0	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan Mesin Belaja Modal	$\frac{374.103.870,00}{374.103.870,00} \times 100\% =$	100	83,03	16,97
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal	$\frac{-}{374.103.870,00} \times 100\% =$	0	16,97	-16,97
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan Belaja Modal	$\frac{-}{374.103.870,00} \times 100\% =$	0	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal	$\frac{-}{374.103.870,00} \times 100\% =$	0	0,00	0,00

Dari total realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 96.199.144.403,00 terserap oleh realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 374.103.870,00 yaitu sebesar 0,39% atau turun sebesar 1,27% bila dibandingkan kontribusi tahun 2022 sebesar 1,66%.

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Berdasarkan Evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Hambatan dan Kendala

- a) Secara keseluruhan Program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 3 program, 20 Kegiatan dan 75 sub kegiatan. Selanjutnya sampai dengan per 31 Desember 2023 terdapat 1 (satu) Sub kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran kurang dari 80% yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM pelaksana pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk melaksanakan kegiatan monitoring dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- b) Keterbatasan pegawai ASN baik kualitas maupun kuantitas.
- c) Keterbatasan secara kualitas artinya terbatasnya pegawai yang mempunyai dasar pengetahuan/latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi nya. Keterbatasan secara kuantitas artinya terbatasnya jumlah pegawai yang ada pada setiap PPTK di setiap bagian sehingga masih terjadi penumpukan tupoksi pada satu orang pegawai.
- d) Terbatasnya pemahaman/pengetahuan pegawai mengenai Peraturan Administrasi Pengelolaan Keuangan terutama dalam hal pemahaman terhadap peraturan baru sehingga ada hal-hal yang harus disesuaikan.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut, terdapat beberapa solusi sebagai alternatif pemecahan permasalahan yang diharapkan dapat diambil guna memberikan perbaikan kinerja ke depan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
 - a) Dari sisi perencanaan : tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih awal, lebih cermat, segera setelah APBD ditetapkan sehingga waktu pelaksanaan kegiatan lebih leluasa

- b) Dalam pelaksanaan kegiatan dan penentuan target kinerja kegiatan perlu dilakukan secara cermat serta ditetapkan output yang jelas dan terukur (*SMART = Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely*)
 - c) Di waktu mendatang perlunya dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kegiatan dan output kegiatan yang sudah dilaksanakan.
 - d) Meningkatkan komunikasi internal antar OPD dan komunikasi eksternal dengan *stakeholder* terkait baik pemerintah pusat, propinsi, instansi vertikal maupun pihak ketiga, untuk mencapai target kegiatan secara maksimal dan update informasi terhadap adanya perubahan peraturan yang terkait dengan kegiatan.
 - e) Meningkatkan kualitas SDM/pegawai yang ada dengan cara diikutsertakan dalam pelatihan, bintek maupun diklat sesuai informasi dan peraturan yang berkembang.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) lebih dimaksimalkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana kegiatan;
 3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia khususnya para Pegawai dalam hal pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB III

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan per 31 Desember 2023, diketahui total realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 96.199.144.403,00 atau mencapai 91,82% dibandingkan dengan total anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 104.768.862.525. Sedangkan apabila dibandingkan dengan total anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 84.557.321.920,00 maka realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 mencapai 113,77% dan apabila dibandingkan dengan total realiasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 83.510.600.481,00 mencapai 115,19%.

Neraca Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis menyajikan informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 22.932.276.613,99 atau turun 59,97% yaitu sebesar (Rp. 34.348.344.295,29) dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 57.280.620.909,28.

Neraca per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari aset lancar Rp. 93.441.200,00; aset tetap Rp. 22.815.752.996,09; aset lainnya sebesar Rp. 23.082.417,90,00 dan selanjutnya dari sisi kewajiban dan ekuitas sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.685.947.689,00 yaitu terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek/Utang belanja jasa kantor dan ekuitas sebesar Rp. 21.246.328.924,99.

Laporan Keuangan Akhir Tahun per 31 Desember 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis menyajikan informasi mengenai realisasi/pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah, periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun penjelasan secara rinci mengenai realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

3.1. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. PENDAPATAN- LRA

Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis tidak terdapat target dan penerimaan pendapatan.

Tabel 3.1
Total Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
Per 31 Desember 2023

URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	% KETERCAPAIAN REALISASI DIBANDING ANGGARAN 2022
<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	0,00	0,00	0,00
<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	0,00	0,00	0,00

3.1.2. BELANJA OPERASI-LRA

Realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 96.199.144.403,00 atau mencapai 91,82% dibandingkan dengan total anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 104.768.862.525,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan total anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 84.557.321.920,00 maka realisasi belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 mencapai 113,77% dan apabila dibandingkan dengan total realiasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 83.510.600.481,00 mencapai 115,19%.

Selanjutnya diketahui total Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realiasi Sekretariat Daerah
Belanja Operasi dan Belanja Modal
Per 31 Desember 2023

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI s.d 31 DESEMBER 2023	% REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
<u>BELANJA DAERAH</u>	104.768.862.525,00	96.199.144.403,00	91,82
BELANJA OPERASI	104.383.879.125,00	95.825.040.533,00	91,80
Belanja Pegawai	20.974.283.125,00	19.166.076.854,00	91,38
Belanja Barang dan Jasa	29.438.596.000,00	29.278.463.679,00	99,46
Belanja Hibah	53.971.000.000,00	47.380.500.000,00	87,79
BELANJA MODAL	384.983.400,00	374.103.870,00	97,17
Belanja Modal	384.983.400,00	374.103.870,00	97,17

Komposisi anggaran dan realisasi belanja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 diatas dapat dilihat dalam garfik sebagai berikut :

Grafik 3.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Setda
Per 31 Desember 2023



3.1.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 19.166.076.854,00 dan Rp. 18.859.406.071,00 atau terjadi kenaikan sebesar 1,63%. Kenaikan tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai berdasarkan perjanjian kerja (PPPK) lingkup Sekretariat Daerah dan penambahan pengangaran insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga berdampak pada peningkatan realisasi penyerapan anggaran Tahun anggaran 2023.

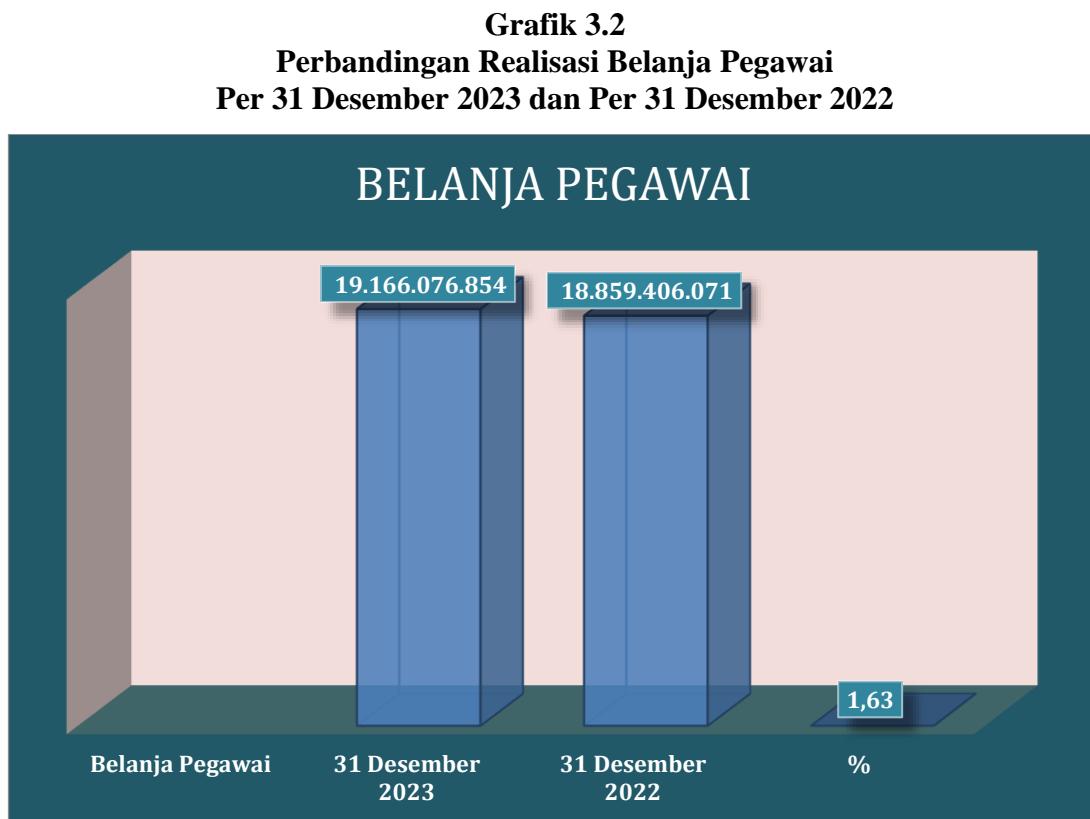
Adapun perbandingan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realiasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		% Naik Turun
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	
Belanja Pegawai	20.974.283.125,00	19.166.076.854,00	18.859.406.071,00	1,63
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.081.820.652,00	8.983.470.714,00	9.146.985.718,00	-1,79
Belanja Gaji Pokok ASN	6.605.031.531,00	6.572.384.000,00	6.675.494.000,00	-1,54
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	646.978.148,00	641.404.172,00	662.690.196,00	-3,21
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	525.539.500,00	522.680.000,00	526.550.000,00	-0,73

Belanja Tunjangan Fungsional ASN	55.596.600,00	54.240.000,00	26.068.000,00	108,07
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	231.019.350,00	229.500.000,00	242.990.000,00	-5,55
Belanja Tunjangan Beras ASN	399.276.142,00	395.268.360,00	415.980.480,00	-4,98
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.003.193,00	14.938.090,00	13.704.081,00	9,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	110.613,00	97.387,00	96.169,00	1,27
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	548.703.431,00	499.201.403,00	528.636.906,00	-5,57
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.640.509,00	13.439.297,00	13.693.933,00	-1,86
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	40.921.635,00	40.318.005,00	41.081.953,00	-1,86
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.559.761.581,00	8.891.201.294,00	8.919.631.325,00	-0,32
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.102.322.848,00	3.452.748.000,00	2.561.056.468,00	34,82
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.078.525.193,00	906.347.500,00	1.569.835.085,00	-42,26
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.378.913.540,00	4.532.105.794,00	4.788.739.772,00	-5,36
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.440.000,00	11.440.000,00	21.520.000,00	-46,84
Belanja Honorarium	11.440.000,00	11.440.000,00	21.520.000,00	-46,84
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	721.260.892,00	679.964.846,00	171.269.028,00	297,02
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.873.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.500.340,00	6.468.000,00	6.468.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.771.400,00	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.677.004,00	5.648.760,00	5.214.240,00	8,33
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	804.313,00	800.311,00	793.428,00	0,87
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	804,00	800,00	720,00	11,11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.490.677,00	5.463.360,00	5.463.360,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.882,00	112.320,00	112.320,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	338.645,00	336.960,00	336.960,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	492.177.968,00	492.177.965,00	-	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	56.513.859,00	16.076.370,00	-	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00

Selanjutnya perbandingan anggaran dan realisasi belanja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 dalam tabel diatas dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



3.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 29.278.463.679,00 dan Rp. 27.516.021.370,00 atau mengalami peningkatan sebesar 6,41% apabila dibandingkan dengan realisasi s.d per 31 Desember 2022. Selanjutnya apabila realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan total anggaran belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp. 29.438.596.000,00 mencapai 99,46%.

Secara rinci perbandingan persentase kenaikan/penurunan belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		% Naik Turun
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	
Belanja Barang dan Jasa	29.438.596.000,00	29.278.463.679,00	27.516.021.370,00	6,41
Belanja Barang	10.677.357.250,00	10.651.975.901,00	9.823.536.816,00	8,43
Belanja Barang Pakai Habis	10.677.357.250,00	10.651.975.901,00	9.812.646.816,00	8,55
Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	10.890.000,00	-100,00

Belanja Jasa	10.660.407.200,00	10.567.286.297,00	10.622.942.247,00	-0,52
Belanja Jasa Kantor	8.972.970.200,00	8.887.911.434,00	8.502.312.247,00	4,54
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	112.680.000,00	112.680.000,00	121.260.000,00	-7,08
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.064.990.000,00	1.061.287.613,00	767.970.000,00	38,19
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	320.767.000,00	320.737.800,00	331.045.000,00	-3,11
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25.000.000,00	24.983.450,00	82.398.000,00	-69,68
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	701.099.000,00	-100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	164.000.000,00	159.686.000,00	116.858.000,00	36,65
Belanja Pemeliharaan	2.368.678.000,00	2.364.609.915,00	3.209.826.482,00	-26,33
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.659.650.000,00	1.655.690.700,00	1.719.070.000,00	-3,69
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	646.028.000,00	645.927.000,00	1.401.759.272,00	-53,92
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.000.000,00	62.992.215,00	88.997.210,00	-29,22
Belanja Perjalanan Dinas	5.412.153.550,00	5.374.591.566,00	3.479.715.825,00	54,45
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.412.153.550,00	5.374.591.566,00	3.479.715.825,00	54,45
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000,00	320.000.000,00	380.000.000,00	-15,79
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000,00	320.000.000,00	380.000.000,00	-15,79

Adapun perbandingan realisasi belanja barang dan jasa sebagaimana tabel diatas terlihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 3.3
Perbandingan dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022



3.1.2.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 47.380.500.000,00 dan Rp. 35.749.870.200,00 atau mengalami kenaikan sebesar 32,53% apabila dibandingkan dengan realisasi s.d per 31 Desember 2022. Hal ini diakibatkan karena terdapat penambahan usulan lembaga penerima hibah Tahun 2023.

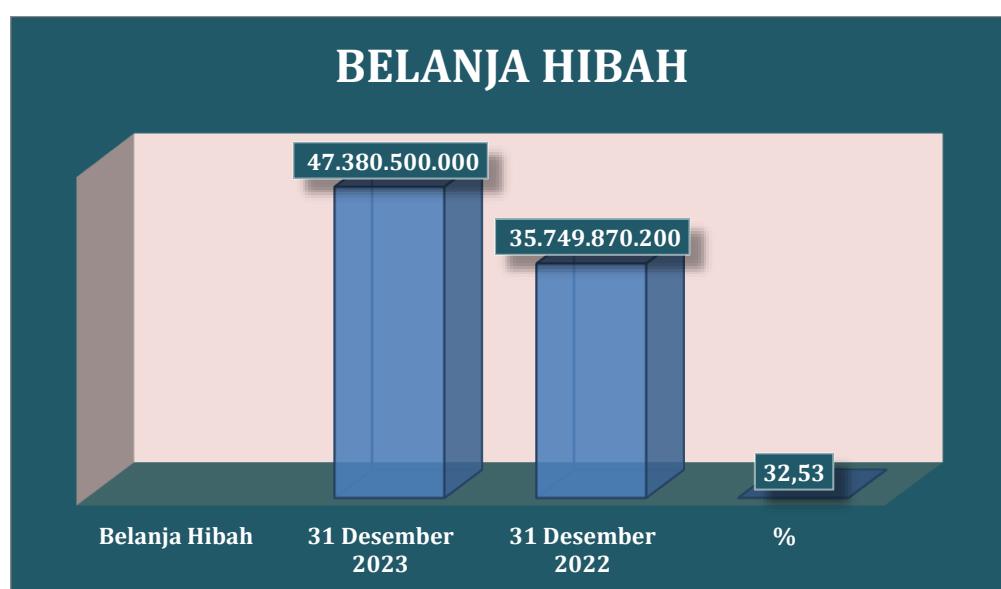
Secara rinci perbandingan prosentase kenaikan/penurunan belanja hibah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Belanja Hibah
Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		% Naik Turun
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	
Belanja Hibah	53.971.000.000,00	47.380.500.000,00	35.749.870.200,00	32,53
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	53.871.000.000,00	47.280.500.000,00	35.649.870.200,00	32,62
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	53.871.000.000,00	47.280.500.000,00	35.649.870.200,00	32,62

Adapun perbandingan realisasi belanja hibah sebagaimana tabel diatas terlihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 3.4
Perbandingan dan Realisasi Belanja Hibah
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2021



3.1.2.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 374.103.870,00 dan Rp. 1.385.302.840,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.011.198.970,00 atau 72,99%.

Hal ini diakibatkan karena *refocusing* anggaran/pengalihan anggaran belanja diantaranya rekening Belanja Modal yang berakibat kurangnya Belanja Modal di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.

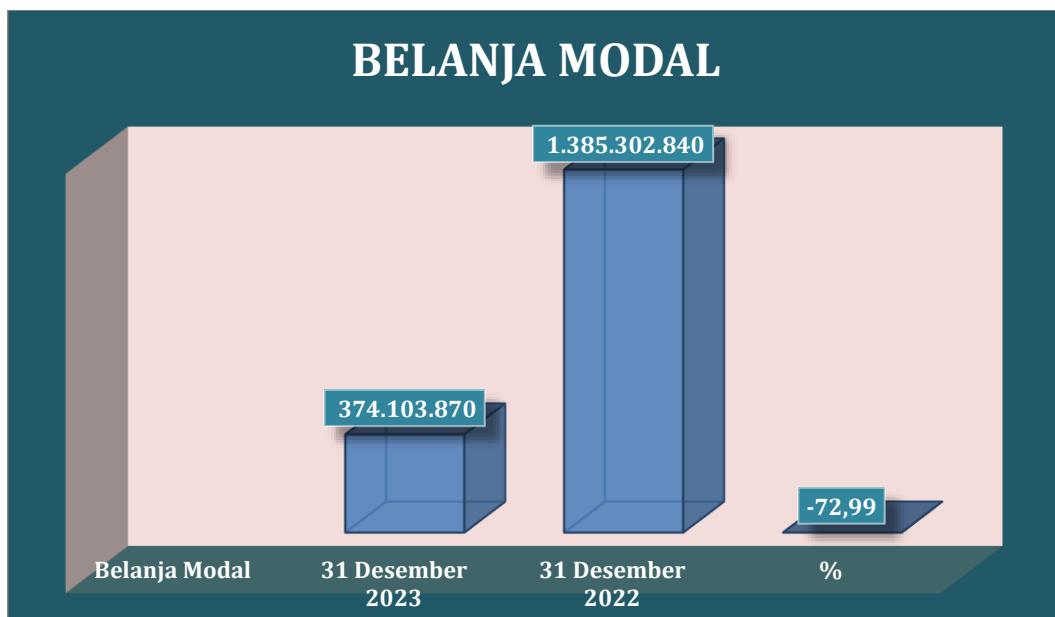
Secara rinci perbandingan persentase kenaikan/penurunan belanja modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terlihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		% Naik Turun
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	
BELANJA MODAL	384.983.400,00	374.103.870,00	1.385.302.840,00	-72,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.983.400,00	374.103.870,00	1.150.278.300,00	-67,48
Belanja Modal Alat Besar	10.700.000,00	10.689.250,00	7.913.500,00	35,08
Belanja Modal Alat Bantu	10.700.000,00	10.689.250,00	7.913.500,00	35,08
Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	75.540.000,00	-100,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	75.540.000,00	-100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	89.880.000,00	87.925.200,00	434.300.550,00	-79,75
Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	209.958.000,00	-95,24
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	79.880.000,00	77.925.200,00	224.342.550,00	-65,27
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	128.903.400,00	128.694.670,00	188.937.450,00	-31,89
Belanja Modal Alat Studio	-	-	114.507.600,00	-100,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	63.903.400,00	63.894.670,00	74.429.850,00	-14,15
Belanja Modal Peralatan Pemancar	65.000.000,00	64.800.000,00	-	100,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	3.000.000,00	-100,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	-	-	3.000.000,00	-100,00
Belanja Modal Komputer	155.500.000,00	146.794.750,00	431.928.800,00	-66,01
Belanja Modal Komputer Unit	107.000.000,00	104.294.750,00	360.130.000,00	-71,04
Belanja Modal Peralatan Komputer	48.500.000,00	42.500.000,00	71.798.800,00	-40,81
Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	8.658.000,00	-100,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	-	-	8.658.000,00	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	235.024.540,00	-100,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	235.024.540,00	-100,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	235.024.540,00	-100,00

Adapun perbandingan realisasi modal sebagaimana tabel diatas. terlihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 3.5
Perbandingan dan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



3.2. PENJELASAN POS-POS DALAM NERACA

3.2.1. ASET	31 Desember 2023	31 Desember 2023
3.2.1.1 ASET LANCAR	93.441.200,00	0,00

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 93.441.200,00 sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mengalami kenaikan. Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 93.441.200,00 terdiri dari :

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.1 KAS DAN SETARA KAS	0,00	0,00

Nilai saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan nilai saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00. Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berupa Saldo Bank sebesar Rp 0,00 sesuai dengan Berita acara posisi kas per 31 Desember 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.2. BEBAN DIBAYAR DI MUKA	72.000.000,00	0,00

Nilai saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 72.000.000,00 sedangkan nilai saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00. Nilai saldo Beban Dibayar Dimuka berupa sewa gedung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Desember Tahun 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.2.1.1.3. PERSEDIAAN	21.441.200,00	0,00

Nilai saldo Aset Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 21.441.200,00 sedangkan nilai saldo Aset Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 21.441.200,00 merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2023.

3.2.1.2. ASET TETAP			
		31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Aset Tetap sebelum Penyusutan	61.104.267.899,09	101.598.538.024,28
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(38.288.514.903,00)	(44.353.042.532,00)
	Aset Tetap setelah Penyusutan	22.815.752.996,09	57.245.495.491,28

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 22.815.752.996,09 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 setelah penyusutan adalah sebesar Rp. 57.245.495.491,28 atau turun sebesar 60,14%. Mutasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

3.2.1.2.a Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 7.859.869.000,00 dan Rp. 14.719.869.000,00. Adapun mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	14.719.869.000,00
Mutasi Tambah:	0,00
- Pembelian	0,00
- Mutasi dari SKPD lain :	0,00
Mutasi Kurang:	6.860.000.000,00
- Mutasi ke SKPD lain :	6.860.000.000,00
Saldo Aktiva Tetap Tanah per 31 Desember 2023	7.859.869.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0,00
Saldo Aktiva Tetap Tanah per 31 Desember 2023	7.859.869.000,00

3.2.1.2.b Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 31.082.223.028,03 dan Rp. Rp. 32.181.165.742,93. Mutasi Aset peralatan mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	32.181.165.742,93
Mutasi Tambah:	1.017.636.370,00
Realisasi Belanja Modal s.d 31 Desember 2023	374.103.870,00
1 Realisasi belanja modal bulan Januari 2023	48.961.170,00
Handphone	1 14.648.670 14.648.670
Rak Buku	1 4.950.000 4.950.000
Sofa	2 14.681.250 29.362.500
2 Realisasi belanja modal bulan Februari 2023	73.981.250,00
Mimbar	2 5.000.000 10.000.000
Handphone	1 17.500.000 17.500.000
Laptop	1 22.949.250 22.949.250
Laptop	1 11.766.000 11.766.000
Laptop	1 11.766.000 11.766.000
3 Realisasi belanja modal bulan Maret 2023	14.735.250,00
Dispenser	3 2.930.400 8.791.200
Pompa	1 4.745.250 4.745.250
Pompa	2 599.400 1.198.800
4 Realisasi belanja modal bulan April 2023	19.813.500,00
Laptop	1 19.813.500 19.813.500
5 Realisasi belanja modal bulan Mei 2023	0
6 Realisasi belanja modal bulan Juni 2023	3.496.000,00
Exhaust Fan	4 499.000 1.996.000
Kompor Gas	3 500.000 1.500.000

7 Realisasi belanja modal bulan Juli 2023			8.800.000
Tv LED Sharp 42 Inch	1	4.400.000	4.400.000
Tv LED Sharp 42 Inch	1	4.400.000	4.400.000
8 Realisasi belanja modal bulan Agustus 2023			36.000.000
Ica Online UPS SE6100	1	24.000.000	24.000.000
Laptop Asus AMD 3 Ryzen	1	12.000.000	12.000.000
9 Realisasi belanja modal bulan September 2023			7.614.600
A.C Split Panasonic 2 PK	1	7.614.600	7.614.600
10 Realisasi belanja modal bulan Oktober 2023			35.260.900
Printer Epson Eco Tank L3210	1	3.500.000	3.500.000
Pc Computer Lenovo	2	13.000.000	26.000.000
Ac Split	1	5.760.900	5.760.900
11 Realisasi belanja modal bulan November 2023			46.746.000
Scanner Epson ES-50	1	3.250.000	3.250.000
Scanner Epson DS-530 II	1	11.750.000	11.750.000
Ipad Air 5 256 GB Cell	1	19.425.000	19.425.000
Apple Pencil Gen 2	1	2.109.000	2.109.000
Ipad Magic Keyboard	1	8.436.000	8.436.000
Apple Magic Mouse 2	1	1.776.000	1.776.000
12 Realisasi belanja modal bulan Desember 2023			78.695.200
Pompa Jet Pump Groundfos	1	4.745.200	4.745.200
Televisi, TV Set 60 inch	1	9.150.000	9.150.000
Genset	1	64.800.000	64.800.000
Mutasi Masuk dari SKPD lain s.d 31 Desember 2023:			643.532.500,00
Mutasi Masuk Bulan Mei 2023			620.537.500,00
Toyota Zenyx Q HV CVT TTS (Z 1232 T)	1	620.537.500	620.537.500
Mutasi Masuk Bulan Juli 2023			19.280.000
Sepeda Motor Yamaha MIO GEAR 2023 Z 6205 U	1	19.280.000	19.280.000
Mutasi Masuk Bulan Oktober 2023			3.715.000
Printer Epson L3211 A4 2023 (Hadiah Penilaian Kinerja)	1	3.715.000	3.715.000
Mutasi Kurang:			2.116.579.084,90
Mutasi ke SKPD lain s.d 31 Desember 2023:			1.633.299.104,00
1 Bulan Januari 2023			977.547.919,00
Sepeda Motor @2004	1	5.800.000	5.800.000,00
Cermin Besar @2016	2	990.000	1.980.000,00
Rak-Rak Penyimpan @2016	1	2.475.000	2.475.000,00
Lemari Kayu @2006	1	650.000	650.000,00

Lemari Kayu @2008	1	1.500.000	1.500.000,00	
CCTV - @2020	20	1.077.750	21.555.000,00	
Alat Kantor Lainnya Lain-Lain @2020	1	11.200.000	11.200.000,00	
Hub @2020	2	1.177.500	2.355.000,00	
Hub @2020	1	558.000	558.000,00	
Hub @2020	1	485.000	485.000,00	
Meja Kerja Kayu @2009	6	750.000	4.500.000,00	
Meja Kerja Kayu @2016	5	1.551.500	7.757.500,00	
Sice @2016	2	2.475.000	4.950.000,00	
Sice @2016	1	3.465.000	3.465.000,00	
Meja Rapat @2009	1	650.000	650.000,00	
Meja Rapat @2016	1	3.410.000	3.410.000,00	
Meja Rapat @2016	1	5.940.000	5.940.000,00	
Meja Tambahan @2005	1	385.000	385.000,00	
Kursi Rapat @2016	10	737.000	7.370.000,00	
Meja Biro @2013	2	1.150.000	2.300.000,00	
Dinding/ Sekat Kayu @2022	3	14.065.180	42.195.540,00	
Mesin Pemotong Rumput @2019	2	2.260.000	4.520.000,00	
AC Split @2006	5	3.750.000	18.750.000,00	
AC Split @2008	4	90.928.150	363.712.600,00	
AC Split @2016	2	6.991.763	13.983.526,00	
AC Split @2016	8	12.281.184	98.249.472,00	
Televisi @2019	1	825.000	825.000,00	
Televisi @2010	1	1.380.000	1.380.000,00	
Loudspeaker @2006	10	3.104.000	31.040.000,00	
Loudspeaker @2014	2	4.500.000	9.000.000,00	
Sound system @2006	1	87.675.000	87.675.000,00	
Microphone Floor Stand @2006	10	739.000	7.390.000,00	
Dispenser @2011	1	500.000	500.000,00	
Gordyn/ Kray @2016	1	25.428.211	25.428.211,00	
Gordyn/ Kray @2016	1	40.692.926	40.692.926,00	
Gordyn/ Kray @2016	1	92.819.644	92.819.644,00	
Bracket standing @2006	2	665.000	1.330.000,00	
Lampu Hias @2005	1	6.250.000	6.250.000,00	
Alat Pemadam Kebakaran @2022	9	1.250.000	11.250.000,00	
Kursi Kerja Pehawai Non Struktural @2009	2	1.200.000	2.400.000,00	
Kursi Kerja Pehawai Non Struktural @2016	5	1.237.500	6.187.500,00	
Lemari Buku Arsip Dinamis @2016	1	7.975.000	7.975.000,00	
Digital Audio Taperecorder @2006	1	1.427.000	1.427.000,00	
PC Unit @2007	1	4.500.000	4.500.000,00	

PC Unit @2019	1	4.472.000	4.472.000,00	
Printer @2019	1	2.409.000	2.409.000,00	
Printer @2014	1	1.900.000	1.900.000,00	
2 Bulan Februari 2023				435.750.185
Mobil Toyota Innova (Z 1070 T) ke BPKD	1	435.750.185	435.750.185	
3 Bulan Desember 2023				220.001.000,00
Toyota Kijang Innova G Z 399 T ke BPKD	1	220.001.000,00	220.001.000,00	
Reklas Barang ke Habis Pakai				2.109.000,00
Apple Pencil Gen 2	1	2.109.000	2.109.000	
Hibah				391.924.391,00
Nissan X Trail 2,5 CVT ST AT Z 1042 T	1	391.924.391	391.924.391	
Reklas ke Ekstracomptable				0,00
Reklas ke Aset Lainnya (Rusak Berat)				89.246.589,90
Laptop	1	6.404.733,00	6.404.733,00	
Laptop	1	6.404.733,00	6.404.733,00	
P.C Unit	1	8.603.099,48	8.603.099,48	
Printer (Peralatan Personal Computer)	1	876.200,00	876.200,00	
Filing Cabinet Besi	1	1.755.000,00	1.755.000,00	
Filing Cabinet Besi	1	1.755.000,00	1.755.000,00	
Filing Cabinet Besi	1	1.755.000,00	1.755.000,00	
Dispenser	1	1.485.000,00	1.485.000,00	
P.C Unit	1	9.212.646,66	9.212.646,66	
Laptop	1	7.656.150,00	7.656.150,00	
Note Book	1	10.890.000,00	10.890.000,00	
Personal Komputer Lain- Lain	1	6.900.300,00	6.900.300,00	
CPU	1	1.015.833,00	1.015.833,00	
Printer (peralatan personal komputer)	1	984.452,17	984.452,17	
Printer (peralatan personal komputer)	1	984.452,17	984.452,17	
Printer (peralatan personal komputer)	1	1.852.850,06	1.852.850,06	
Printer (peralatan personal komputer)	1	4.970.645,18	4.970.645,18	
Printer (peralatan personal komputer)	1	4.970.645,18	4.970.645,18	

Printer (peralatan personal komputer)	1	3.500.000,00	3.500.000,00	
Note Book	1	7.269.850,00	7.269.850,00	
Saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023			31.082.223.028,03	
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023			26.179.541.320,00	
Saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023			4.902.681.708,03	

3.2.1.2.c Gedung/Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung/bangunan yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 20.180.533.911,06 dan Rp. 49.829.394.371,35. Mutasi Aset gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	49.829.394.371,35
Mutasi Tambah:	0
Realisasi Belanja Modal s.d 31 Desember 2023:	0,00
Mutasi dari SKPD lain s.d 31 Desember 2023:	0,00
Mutasi Kurang:	29.648.860.460,29
Mutasi ke SKPD lain s.d 31 Desember 2023:	29.648.860.460,29
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 549.826.000,00 549.826.000,00
- Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 187.058.850,00 187.058.850,00
Bangunan Gedung	
- Tempat Ibadah Permanen	1 895.000.000,00 895.000.000,00
- Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1 7.031.440.630,00 7.031.440.630,00
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1 473.381.000,00 473.381.000,00
- Asrama Permanen	1 12.969.075.033,00 12.969.075.033,00
- Asrama Permanen	1 4.972.619.747,29 4.972.619.747,29
- Pagar Permanen	1 2.521.134.700,00 2.521.134.700,00
- Pintu Pagar	1 49.324.500,00 49.324.500,00
Saldo Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	20.180.533.911,06
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	10.620.054.205,00
Saldo Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	9.560.479.706,06

3.2.1.2.d Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa Jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.707.413.700,00 dan Rp. 4.593.880.650,00. Mutasi Aset jalan irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4.593.880.650,00
Mutasi Tambah:	-
Realisasi Belanja Modal s.d 31 Desember 2023:	-
Mutasi dari SKPD lain :	-
Mutasi Kurang:	2.886.466.950,00
Mutasi ke SKPD lain :	2.886.466.950,00
- Jln Khusus Pejalan Kaki 1 475.983.000 475.983.000	
- Jln Khusus Lingkungan 1 2.333.346.950 2.333.346.950	
- Jln Khusus Khusus Lingkungan 1 25.000.000 25.000.000	
- Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya 1 52.137.000 52.137.000	
Saldo Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023	1.707.413.700,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	1.245.314.201,00
Saldo Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023	462.099.499,00

3.2.1.2.e Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 274.228.260,00 dan Rp. 274.228.260,00. Mutasi Aset Tetap lainnya adalah sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	274.228.260,00
Mutasi Tambah:	0
- Realisasi Belanja Modal s.d 31 Desember 2023:	0
- Mutasi dari SKPD lain :	0
Mutasi Kurang:	0
- Mutasi dari SKPD lain :	0
- Penghapusan	0
Saldo Aktiva Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	274.228.260,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	243.605.177,00
Saldo Aktiva Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	30.623.083,00

3.2.1.2.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Selanjutnya saldo Aset Tetap Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 22.815.752.996,09 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Saldo Akhir
		31 Desember 2023		per 31 Desember 2023
		Rp.		Rp.
1	Tanah	7.859.869.000,00	0,00	7.859.869.000,00
2	Peralatan dan Mesin	31.082.223.028,03	26.179.541.320,00	4.902.681.708,03
3	Gedung dan Bangunan	20.180.533.911,06	10.620.054.205,00	9.560.479.706,06
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.707.413.700,00	1.245.314.201,00	462.099.499,00
5	Aset Tetap Lainnya	274.228.260,00	243.605.177,00	30.623.083,00
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		61.104.267.899,09	38.288.514.903,00	22.815.752.996,09

3.2.1.3. ASET LAINNYA			
		31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Aset Lainnya	23.082.417,00	102.342.838,00

3.2.1.3.a Aset Lainnya (Tidak termasuk ke dalam Aset Tetap)

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 23.082.417,00 dan Rp. 35.125.000,00. Adapun perincian saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 29.103.917,00 sebagai berikut :

ASET LAINNYA per 31 Desember 2023	23.082.417,00
1. Aset lainnya – Aset Tidak Berwujud	60.215.000,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-37.132.583,00
Saldo Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud	23.082.417,00
2. Aset lainnya – Aset Lain-lain	89.246.589,90
Amortisasi Aset Lain-lain	-89.246.589,90
Saldo Aset Lainnya – Aset Lain-lain	0,00
3. Aset Lainnya Piutang Dakabalarea	0,00
Penyisihan Piutang Dakabalarea	0,00
Saldo piutang dakabalarea	0,00
4. Piutang PD. BPR/BKPD/LPK BBKU	4.380.462.509,41
Penyisihan Piutang PD. BPR/BKPD/LPK BBKU	-4.380.462.509,41
Saldo piutang PD. BPR/BKPD/LPK BBKU	0,00

1) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 60.215.000,00 dan Rp. 102.342.838,00. Adapun perincian Aset Tak Berwujud dimaksud adalah sebagai berikut :

Saldo Aset Tak berwujud per 31 Desember 2022	60.215.000,00
Mutasi Tambah:	0
• Penambahan Aset Tak Berwujud Tahun 2023	0
Mutasi Kurang:	0
• Mutasi ke SKPD Lain	0
• Penghapusan Aset (software/program aplikasi)	0
Total Aset Tak berwujud per 31 Desember 2023	60.215.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	37.132.583,00
Saldo Aset Tidak Berwujud Lainnya	23.082.417,00

2) Aset Lain-Lain (Rusak Berat)

Saldo Lain-lain (Rusak Berat) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 89.246.589,90 dan Rp. 0,00. Adapun perincian Aset Lain-lain (Rusak Berat) dimaksud adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0,00
Mutasi Tambah:	89.246.589,90
Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya (Rusak Berat) Tahun 2023	89.246.589,90
- Laptop	1 6.404.733,00 6.404.733,00
- Laptop	1 6.404.733,00 6.404.733,00
- P.C Unit	1 8.603.099,48 8.603.099,48
- Printer (Peralatan Personal Computer)	1 876.200,00 876.200,00
- Filing Cabinet Besi	1 1.755.000,00 1.755.000,00
- Filing Cabinet Besi	1 1.755.000,00 1.755.000,00
- Filing Cabinet Besi	1 1.755.000,00 1.755.000,00
- Dispenser	1 1.485.000,00 1.485.000,00
- P.C Unit	1 9.212.646,66 9.212.646,66
- Laptop	1 7.656.150,00 7.656.150,00
- Note Book	1 10.890.000,00 10.890.000,00
- Personal Komputer Lain-Lain	1 6.900.300,00 6.900.300,00
- CPU	1 1.015.833,00 1.015.833,00
- Printer (peralatan personal komputer)	1 984.452,17 984.452,17
- Printer (peralatan personal komputer)	1 984.452,17 984.452,17

- Printer (peralatan personal komputer)	1	1.852.850,06	1.852.850,06	
- Printer (peralatan personal komputer)	1	4.970.645,18	4.970.645,18	
- Printer (peralatan personal komputer)	1	4.970.645,18	4.970.645,18	
- Printer (peralatan personal komputer)	1	3.500.000,00	3.500.000,00	
- Note Book	1	7.269.850,00	7.269.850,00	
<u>Mutasi Kurang:</u>				0,00
Penghapusan Aset Lainnya Rusak Berat				0,00
Saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023				89.246.589,90
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023				89.246.589,90
Saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023				0,00

3) Aset Lainnya – Piutang Dakabalarea

Saldo aset lainnya-piutang Dakabalarea per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

PIUTANG	31 Desember 2023	31 Desember 2021
Piutang Dakabalarea	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dakabalarea	0,00	0,00
Piutang Dakabalarea Netto	0,00	0,00

Saldo piutang macet per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 ini merupakan saldo/sisa piutang dakabalarea yang sudah tertagih seluruhnya melalui pembayaran angsuran/pelunasan melalui KPKNL ke Kas Daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Penyerahan Piutang Macet kepada KPKNL :		
Tahap I (05 Maret 2014)	80 berkas	815.961.600,00
Tahap II (08 April 2014)	80 berkas	361.577.050,00
Tahap III ((04 Juni 2014)	80 berkas	275.586.000,00
Tahap IV (05 Juni 2014)	80 berkas	374.278.200,00
Tahap V (06 Nov 2014)	38 berkas	180.427.800,00
Jumlah Berkas Piutang Macet yang telah diserahkan (awal)	358 berkas	2.007.830.650
Ditambah :		131.275.300,00
Piutang macet dikembalikan dan sudah dilengkapi kembali kekurangan persyaratan kepada KPKNL	26 berkas	131.275.300,00

PIUTANG YANG DISERAHKAN KE KPKNL	384	2.139.105.950
Ditambah :		5.624.789,00
Kelompok yang belum diproses KPKNL :		
Cipeureu Indah dan Balebat	2	5.076.889,00
Kelompok Lunas sebelum pengurusan KPKNL (Sugih Mukti	1	547.000,00
*ditambah 3 kelompok lunas (Simpati, mulyasari, Mekar) jadi total kelompok 390		
Selisih pencatatan di KPKNL (selisih kurang) Kelompok Mawar Sari seharusnya Rp. 1.489.900,00		900
TOTAL PIUTANG YANG DISERAHKAN		
3 Kelompok Lunas sebelum diserahkan pengurusan ke KPKNL, jadi total 390 kelompok	387	2.144.730.739
Dikurangi :		64.987.509,00
Piutang yang dinyatakan Lunas s.d 31 Des 2014	10	48.448.891,00
Piutang yang mengangsur s.d 31 Des 2014		16.538.618,00
SALDO PIUTANG 31 DES 2014		2.079.743.230
Mutasi Tambah: -		0,00
Mutasi Kurang TAHUN 2015 :		1.411.805.976,00
Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda TA 2015		9.252.926
Penghapusbukuan (PSBDT) Piutang Dakabalarea I (SK Bupati Ciamis terlampir)		1.195.292.050
Penghapusbukuan (PSBDT) Piutang Dakabalarea II (SK Bupati Ciamis terlampir)		207.261.000
SALDO PIUTANG DAKABALAREA PER 31 DES 2015		667.937.254
Mutasi Tambah: -		0,00
Mutasi Kurang tahun 2016 :		240.818.192,00
Pembayaran angsuran/pelunasan piutang ke Kasda TA 2016		7.597.092
Penghapusbukuan (PSBDT) Piutang Dakabalarea (SK Bupati Ciamis terlampir)		233.221.100,00
Saldo Piutang Dakabalarea per 31/12/2016		427.119.062,00
koreksi tambah pengakuan piutang disebabkan adanya piutang yang kurang catat		6.701.037,00
JUMLAH		433.820.099,00
Mutasi Tambah:		0,00
Mutasi Kurang :		427.955.133,00
Penghapusbukuan (PSBDT) Piutang Dakabalarea (SK Bupati Ciamis terlampir)		44.566.000,00
Penghapusbukuan (PSBDT) Piutang Dakabalarea (SK Bupati Ciamis terlampir)		27.756.000,00
Penghapusbukuan (PSBDT) Piutang Dakabalarea (SK Bupati Ciamis terlampir)		283.690.388,00

Penghapusbukuan (PSBDT) Piutang Dakabalarea (SK Bupati Ciamis terlampir)	68.670.021,00
Pembayaran angsuran piutang melalui KPKNL ke Kasda per 01 Januari sd Desember 2017	3.272.724,00
Saldo Piutang Dakabalarea per 31 Desember 2017	5.864.966,00
Mutasi Tambah Tahun 2018:	0,00
Mutasi Kurang Tahun 2018 :	1.272.727,00
Pembayaran angsuran piutang melalui KPKNL ke Kasda per 01 Januari sd Desember 2018	
Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara	181.818,00
Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara	181.818,00
Zondrianto/Kelompok Sari Jati	909.091,00
Saldo Piutang Dakabalarea per 31 Desember 2018	4.592.239,00
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	2.778.960,00
Setoran Tahun 2019 :	
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara	181.818
- Zondrianto/Kelompok Sari Jati	1.960.778
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara	227.273
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara	227.273
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara	181.818
Saldo Piutang Dakabalarea per 31 Desember 2019	1.813.279,00
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	818.181,00
Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda Tahun 2020 :	
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara/BJB Ciamis/Pemkab Ciamis	181.818,00
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara/BJB Ciamis/Pemkab Ciamis	181.818,00
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara/BJB Ciamis/Pemkab Ciamis	181.818,00
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara/BJB Ciamis/Pemkab Ciamis	272.727,00
Saldo Piutang Dakabalarea per 31 Desember 2020	995.098,00
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	545.454,00
Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda Tahun 2021 :	
Setoran Tahun 2021 :	
Bulan Pebruari 2021	
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara/BJB Ciamis/Pemkab Ciamis	181.818,00

Bulan Juni 2021	
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara/BJB Ciamis/Pemkab Ciamis	181.818,00
Bulan November 2021	
- Ayi Miad/Kelompok Tiga Saudara/BJB Ciamis/Pemkab Ciamis	181.818,00
Saldo Piutang Dakabalarea per 31 Desember 2021	449.644,00
Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda Tahun 2022 :	449.644,00
Pembayaran Ayi Miad/ 26/3/2022	179.319,00
Pembayaran Ayi Miad/ 29/6/2022	265.326,00
Pembayaran kekurangan angsuran ke kas daerah	4.999,00
Saldo Piutang Dakabalarea per 31 Desember 2022	-

4) Aset Lainnya – Piutang PD BPR Dilikuidasi

Saldo aset lainnya-piutang 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 4.380.462.509,41 dan Rp. 4.609.249.168,41

PIUTANG	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang BPR/BKPD/ LPK BBKU	4.380.462.509,41	4.406.863.009,41
Penyisihan Piutang BPR/BKPD/ LPK BBKU	-4.380.462.509,41	-4.406.863.009,41
Piutang BPR/BKPD/ LPK BBKU Netto	0,00	0,00

Saldo piutang macet per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.380.462.509,41. merupakan saldo piutang saldo piutang macet yang belum tertagih berdasarkan hasil verifikasi dan inventarisasi yang mana penyelesaian pengurusannya diserahkan kepada KPKNL Tasikmalaya dan merupakan penyesuaian saldo piutang setelah dikurangi pembayaran angsuran/pelunasan melalui KPKNL ke Kas Daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Piutang PD BPR DL per 31/12/2013	7.481.542.445,00
Mutasi Tambah:	71.521.428,00
1. Selisih nilai lebih Piutang BPR BKPD BBKU Kec Cijeungjing	71.521.428,00
selisih lebih antara daftar nominatif piutang dengan piutang yang tercantum dalam NAL untuk BPR BBKU Kecamatan Cijeungjing sebesar Rp.71.521.428,00 terdiri dari :	
Piutang yang berkasnya tidak ada/lapuk/tidak terbaca sebanyak 67 Debitur (rincian per debitur terdapat dalam lampiran Laporan Hasil Kajian Pengambilalihan Piutang 23 PD. BPR BBKU DL oleh BPKP Jawa Barat) sebesar Rp. 57.459.448,00	

Piutang yang berkas lengkap sebesar Rp. 14.061.980,00, berasal dari perhitungan saldo Piutang menurut NAL – Saldo Piutang Hasil Inventarisasi yang berkasnya lengkap (Rp.289.061.570 – Rp.303.123.550)	
Mutasi Kurang :	13.967.000,00
1. Pelunasan Piutang dari 3 PD. BPR BKPD LPK BBKU	13.967.000,00
- Herliatin	10.000.000,00
- Udin Sudin Armilah	917.000,00
- Nurmansyah	2.000.000,00
- Anda Sujana	1.050.000,00
Saldo Piutang PD BPR DL per 31/12/2014	7.539.096.873,00
Mutasi Tambah:	1.112.693.300,00
Piutang Lengkap Dokumen (hasil inventarisasi ulang) sesuai	
1. dokumen hasil kajian BPKP Perwakilan Jabar No : Lki.987/PW10/4/2015	1.112.693.300
Mutasi Kurang :	3.039.184.529,59
1. Pelunasan piutang oleh nasabah (disetor langsung ke Kasda)	6.400.000,00
2. Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda	43.981.060,00
3. Penghapusbukuan Piutang tidak ada dokumen(sesuai SK Bupati Ciamis No : 900/Kpts.664-Huk/2015	2.988.803.469,59
Saldo Piutang PD BPR DL per 31/12/2015	5.612.605.643,41
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	141.932.552,00
1. Pelunasan angsuran/setoran ke Kasda Tahun 2016	136.067.819,00
- Januari 2016	7.740.698,00
- Februari 2016	7.911.942,00
- Maret 2016	21.643.680,00
- April 2016	5.039.212,00
- Mei 2016	8.425.805,00
- Juni 2016	8.024.569,00
- Juli 2016	10.936.716,00
- Agustus 2016	5.066.905,00
- September 2016	13.258.993,00
- Oktober 2016	20.364.691,00
- November 2016	10.628.455,00
- Desember 2016	10.303.603,00
- Setor melalui Bagian Perekonomian	6.722.550,00
2. Koreksi Tahun 2015	5.864.733,00
Setoran Bulan Sept 2015 yang belum tercatat :	6.534.000,00
Setoran Dakabalarea yg tercatat di Piutang BPR :	-669.267,00
- Kelp. Mitra Unggas	-198.020,00
- Kelp. Mitra Unggas	-198.020,00
- Kelp Sawargi	-272.727,00
- Koreksi lebih catat TA 2015	-500,00
Saldo Piutang PD BPR DL per 31/12/2016	5.470.673.091,41

Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	61.185.735,00
1. Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda Tahun 2017	61.185.735,00
Saldo Piutang BPR DL per 31 Desember 2017	5.409.486.856,41
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	18.229.947,00
1. Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda Tahun 2018	18.229.947,00
Saldo Piutang BPR DL per 31 Desember 2018	5.390.802.364,41
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	14.784.298,00
1. Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda Tahun 2019 :	14.784.298,00
Bulan Januari 2019 :	
- Neni mansyur	18.182
Bulan Pebruari 2019 :	
- Tarya	181.818
Bulan April 2019 :	
- Tarya	181.818
- Neni Mansyur	18.182
Bulan Mei 2019 :	
- Tarya	181.818
- Soma Uju	175.000
Bulan Juni 2019 :	
- Neni Mansyur	18.182
- AH. Edon Hmadan	1.702.000
- Neni Mansyur	18.182
- Taryati	1.500.000
- Maman Sudirman	909.091
- Tarya	181.818
Bulan Juli 2019 :	
- Suherman	130.000
Bulan Agustus 2019 :	
- Tarya	181.818
- Opah	1.375.000
- Tatang Sutisna	633.799
- Utji Sanoesi	909.091
- O. Pendi	369.000
- Tasya	154.000
- Tarya	181.818
Bulan September :	
Nana Suryana	1.250.000
Dede Ruhyanto	37.000
Bulan Oktober :	
Ai Habibah	454.545

Tarya	181.818
Bulan November :	
Udi Oop	478.500
Bulan Desember :	
Atmirah	70.000
Ero Sutara	70.000
Tarya	181.818
Asep Nuryana	2.840.000
Saldo Piutang BPR DL per 31 Desember 2019	5.376.018.066,41
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	763.628.737,00
1. Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda Tahun 2020 :	1.217.464,00
- Sopyan/BPR Ciamis/Pemkab Ciamis	45.455,00
- Komar/BPR Ciamis/Pemkab Ciamis	90.909,00
- Tati	71.000,00
- Salim	50.000,00
- Hasim (alm)/abdul rosid	25.000,00
- Priatna Jidin	100.000,00
- Parhan	50.000,00
- Dayat (alm)/mamah dartimah	23.000,00
- Endang Imam	75.000,00
- Samsudin	55.500,00
- Carwa	48.000,00
- Sopanti	45.455,00
- A. Atikah	4.600,00
- Rumanta	5.000,00
- Kanadi	100.000,00
- Adna	84.000,00
- Engkos	100.000,00
- Sarna	20.500,00
- Uli	50.000,00
- Sarya	17.500,00
- Abdul Roh	55.000,00
- Hendarsah	58.000,00
- Sapanti	43.545,00
2. Penghapusan piutang karena diserahkan ke Kabupaten Pangandaran	762.411.273,00
Saldo Piutang BPR DL per 31 Desember 2020	4.612.389.329,41
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	3.589.805,00
1. Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda Tahun 2021 :	3.589.805,00
- Amanah	134.000,00
- Dedi Heryadi	120.000,00
- Mulyani	85.000,00

- Een Suhaenah	240.000,00
- Tati	133.000,00
- Sumanah	85.000,00
- Dede Tatang	322.727,00
- Kukun Saefudin	198.023,00
- Tiarsih	160.000,00
- Yuyu Mulyana	129.000,00
- Ramlil	171.600,00
- Dede	176.000,00
- Romli	1.535.455,00
- Suherman	100.000,00
Saldo Piutang BPR DL per 31 Desember 2021	4.608.799.524,41
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	201.936.515,00
Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui KPKNL ke Kasda	
1. Tahun 2022	
- Penghapusbukuan (PSBDT) Piutang PD. BPR BKPD DL	201.936.515,00
(SK Bupati Ciamis No. 500/Kpts.588-Huk/2022) Tanggal 7 Juli 2022	
Saldo Piutang BPR DL per 31 Desember 2022	4.406.863.009,41
Mutasi Tambah:	0,00
Mutasi Kurang :	26.400.500,00
1. Piutang PD. BPR BKPD DL dinyatakan lunas pada Tahun 2023	26.400.500,00
sebanyak 127 debitur	
- Sutisna Asikin	1.700.000,00
- Aan Z Anwar	1.950.000,00
- Cucu	109.000,00
- Eman Sulaeman	110.000,00
- Oyo Waryono	104.500,00
- Udin P	107.000,00
- Kioh	108.000,00
- M. Sudirja	200.000,00
- Sahnan	130.600,00
- Sulaeman	128.500,00
- Arsih	152.000,00
- Adah	117.400,00
- Udin/Rasti	130.000,00
- Komar	165.000,00
- Karyo	149.000,00
- Abdul	130.000,00
- Waryo	165.000,00
- Isah	149.900,00
- Nunung Mintarsih	358.800,00
- Isoh	150.000,00
- Titi	121.000,00
- Sanhudi	110.650,00
- Salpi/ Wiharya	120.000,00
- R Ajat Sudrajat	180.000,00

- Karna	151.000,00
- Dedi Suherdi	150.000,00
- Eman Rusmini	120.000,00
- Suhendi	180.000,00
- Komar	268.000,00
- Mamah	126.000,00
- Yoyo Sutaryo	148.000,00
- Djaja Rubi	160.000,00
- Oyoh Komariah	170.000,00
- Kardi	165.000,00
- Usep Hermanto	150.000,00
- Siti Rokayah	127.000,00
- Ningrum	172.600,00
- Oyo Sutarya	150.000,00
- Juariah	112.500,00
- Mulyana	111.500,00
- Ahmad	124.500,00
- Jumsa	120.000,00
- Saepudin	127.000,00
- Ilah	124.500,00
- Ojo	130.000,00
- Emong	123.000,00
- Suwirta	125.000,00
- Suryani	122.000,00
- I Samsudin	126.000,00
- Ijah	121.000,00
- Jojo Sudarja	120.000,00
- Mariah	113.000,00
- Ending	125.000,00
- Rosid Bsc	120.000,00
- Usa	120.000,00
- Parman/Entin	125.000,00
- Nurdin	120.000,00
- Jasir	125.000,00
- Suryadisastra	164.000,00
- Uday	160.000,00
- Arifin Rahman	171.350,00
- Kusnadi	120.000,00
- Jamhuri	160.000,00
- Rohili	152.300,00
- Odjo	170.000,00
- NONDI	161.000,00
- Uyo Suryana	160.000,00
- Imi	160.000,00
- Adun	171.000,00
- Aminta	160.000,00

- Eman S	163.000,00
- Emoh Hoatimah	175.000,00
- Didi	170.000,00
- Tirya	160.000,00
- Agus	139.900,00
- Kosim	150.000,00
- Enon	146.000,00
- Risna	140.000,00
- Eno	150.000,00
- Idris H	140.000,00
- Sadri	134.000,00
- Pudin	145.000,00
- S. Lismaya	139.000,00
- Om Budi	145.000,00
- Supriadi	150.000,00
- Masno Efendi	139.500,00
- Tarsan Muda	130.000,00
- Juhanta	150.000,00
- Usin	150.000,00
- Dedi Suwandi	150.000,00
- Ohim	150.000,00
- Memed Abdul Hamid	151.000,00
- Duki Mudakir	135.000,00
- Ade Sulaeman	150.000,00
- Dede Titing	720.000,00
- Udin	130.000,00
- Waryo	790.000,00
- Udin Mahpudin	175.000,00
- Toha Sanbisri	165.000,00
- Onih	180.000,00
- Djadja M	180.000,00
- Dedi Supriadi	165.000,00
- Uun	176.000,00
- Udis/Ami	180.000,00
- Ahman	177.200,00
- Udin	600.000,00
- Emin Karmin	170.000,00
- Jubaedi	130.000,00
- Asih	157.500,00
- Haer Hermawan	159.000,00
- Kitong	140.000,00
- Isov	180.000,00
- Jahro Asih	115.000,00
- Roni	180.000,00
- Ny. Yuyun	176.600,00
- Nono Surya	150.000,00

- Nono Karsono	150.000,00
- Nani Hidayat	167.000,00
- Sutarwan	180.000,00
- Atmaja	145.000,00
- Cucu S	179.000,00
- E. Kostaman	180.000,00
- K. Saleh	168.000,00
- Abas	177.500,00
- Yuyu	137.500,00
- Darso	151.600,00
- Anda	165.000,00
- Jaenah	160.000,00
- Surma Waryono	145.000,00
- Haer	143.400,00
- Ayi Kurnia	180.000,00
- Sarjo	152.000,00
- Hasan	163.200,00
- Zenal Haris	142.000,00
- Suanda	180.000,00
- Yunus	169.500,00
- Suhana Udin	130.000,00
- Jeje E Kuraisin	140.000,00
- Elon	160.000,00
- Wiharno	160.000,00
- Muslihudin	160.000,00
- Ilah Carmilah	237.500,00
Saldo Piutang BPR DL per 31 Desember 2023	4.380.462.509,41

Selanjutnya saldo aset lainnya Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 23.082.417,00 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Lainnya	Saldo per 31 Desember 2023	Amortisasi/ Penyusutan	Saldo
Aset Tidak Berwujud	60.215.000,00	(37.132.583,00)	23.082.417,00
Aset Lain-lain	89.246.589,90	(89.246.589,90)	0
Piutang BPR	4.380.462.509,41	(4.380.462.509,41)	0
Piutang Dakabalarea	0,00	0,00	0
TOTAL	4.529.924.099,31	-4.506.841.682,31	23.082.417,00

5) Penyisihan Aset Lainnya

Penyisihan Aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. (4.506.841.682,31) dan Rp. (4.566.586.125,17) adalah merupakan penyisihan piutang macet dakabalarea dan piutang macet PD. BPR DL dan akumulasi penyusutan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	(37.132.583,00)	(25.089.583,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya - Aset lain-lain	(89.246.589,90)	(136.755.615,00)
Penyisihan Aset Lainnya - Piutang BPR	(4.380.462.509,41)	(4.406.863.009,41)
Penyisihan Aset Lainnya - Piutang Dakabalarea	0,00	(0,00)
Total Penyisihan Aset Lainnya	-4.506.841.682,31	-4.568.708.207,41

3.2.2. KEWAJIBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban	1.685.947.689,00	972.296.061,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.685.947.689,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 972.296.061,00. Kewajiban tersebut terdiri dari utang belanja sebesar Rp. 1.685.947.689,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00 (Nihil). Utang Belanja dimaksud merupakan utang atas pemakaian listrik, air dan telepon dan utang belanja pegawai Tahun 2023 yang dibayar Tahun 2024

Adapun rincian utang jasa kantor sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Utang Belanja	1.685.947.689,00	972.296.061,00
Utang Belanja Pegawai	1.605.404.210,00	905.246.418,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan	40.093.772	20.422.628,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	585.942.000	252.802.000,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	164.616.000	42.062.000,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	749.367.800	443.949.300,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.208.009	935.404,00

Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	15.906.708	13.501.356,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	239.203	313.642,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9.482.533	7.393.587,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	-	74.307.375,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	226.361	143.756,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	278.876	139.760,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.961	1.038,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	39.434.572,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	16.875.000	9.840.000,00
Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	-	
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.189.102	
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.346.645	
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.664.915	
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.775.000	
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	6.000.000	
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.187.325	
Utang Belanja Jasa kantor :	80.543.479,00	67.049.643,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	11.191.877,00	9.934.556,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	12.167.200,00	6.320.600,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	51.519.459,00	44.700.859,00
Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/ Faksimile	5.664.943,00	6.093.628,00

3.2.3. EKUITAS		31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Ekuitas	21.246.328.924,99	56.308.324.848,28

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 21.246.328.924,99 sedangkan saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 56.308.324.848,28. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 21.246.328.924,99 merupakan hasil perhitungan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dari Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 yang merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2022 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	56.308.324.848,28	49.948.132.279,87
Surplus/Defisit-LO	(99.569.391.802,00)	(86.775.678.722,13)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	93.500.792,88
- Dampak Kumulatif – Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	0,00	(9.277.641,12)
- Dampak Kumulatif – Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	77.183.452,00
- Dampak Kumulatif – Akumulasi Aset Tetap Lainnya	0,00	(176.791.177,00)
- Dampak Kumulatif – Penyisihan Piutang	0,00	202.386.159,00
RK PPKD	64.507.395.878,71	93.042.370.497,66
RK PPKD	96.199.144.403,00	83.510.600.481,00
RK Barang	(31.691.748.524,29)	9.531.770.016,66
JUMLAH EKUITAS AKHIR	21.246.328.924,99	56.308.324.848,28

3.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

3.3.1. PENDAPATAN – LO

Realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp. 0,00 dan realisasi Pendapatan-LRA adalah sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BEBAN	PENGURANGAN HUTANG BEBAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
PENDAPATAN-LO	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain PAD Yang Sah - LO (Setoran piutang macet)	-	-	-	-	-	-	-

3.3.2. BEBAN - LO

Realisasi beban-LO sebesar Rp. 99.569.391.802,00. Sedangkan realisasi Belanja operasi-LRA diluar belanja Modal adalah sebesar Rp 95.825.040.533,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp. 95.825.040.533,00 dengan realisasi Belanja Operasional-LO sebesar Rp 99.569.391.802,00. Terdapat selisih lebih besar belanja Operasional-LO sebesar Rp. 3.352.426.878,00 disebabkan adanya penambahan sebesar Rp. 4.418.164.139,00 dan pengurangan sebesar Rp. 1.065.737.261,00 dari pengakuan beban utang belanja pegawai, utang belanja jasa kantor, beban sewa dibayar dimuka, beban penurunan nilai dan persediaan SKPD yang digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan SKPD dalam tahun 2023 dan/maupun tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BEBAN	PENGURANGA N HUTANG BEBAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
PENDAPATAN- LO	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain PAD Yang Sah - LO (Setoran piutang macet)	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN DAERAH - LO	95.825.040.533,00	4.418.164.139,00	1.065.737.261,00	99.569.391.802,00	86.112.619.258,00	13.456.772.544,00	13,51
BEBAN OPERASI	95.825.040.533,00	4.418.164.139,00	1.065.737.261,00	99.569.391.802,00	86.112.619.258,00	13.456.772.544,00	13,51
Beban Pegawai	19.166.076.854,00	1.605.404.210,00	905.246.418,00	19.866.234.646,00	18.874.714.159,00	991.520.487,00	4,99
Beban Barang	10.651.975.901,00	2.109.000,00	21.441.200,00	10.632.643.701,00	9.823.536.816,00	809.106.885,00	7,61
Beban Jasa	10.567.286.297,00	80.543.479,00	139.049.643,00	10.508.780.133,00	10.700.019.027,00	(191.238.894,00)	(1,82)
Beban Pemeliharaan	2.364.609.915,00	-	-	2.364.609.915,00	3.209.826.482,00	(845.216.567,00)	(35,74)
Beban Perjalanan Dinas	5.374.591.566,00	-	-	5.374.591.566,00	3.479.715.825,00	1.894.875.741,00	35,26
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000,00	-	-	320.000.000,00	380.000.000,00	(60.000.000,00)	(18,75)
Beban Hibah	47.380.500.000,00	-	391.924.391,00	47.772.424.391,00	35.749.870.200,00	12.022.554.191,00	25,17
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	2.730.107.450,00	-	2.730.107.450,00	3.894.936.749,00	(1.164.829.299,00)	(42,67)
BEBAN LAIN- LAIN	-	-	-	-	85.979.816,00	(85.979.816,00)	100,00
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	85.979.816,00	(85.979.816,00)	100,00
BEBAN PENURUNAN NILAI INVESTASI	-	-	-	-	2.430.000,00	(2.430.000,00)	100,00
Beban Penurunan Nilai (Ekstracomptable Tahun Berjalan	-	-	-	-	2.430.000,00	(2.430.000,00)	100,00
Defisit Non Operasional	-	-	-	-	574.649.647,89	-	-
Defisit Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Defisit penghentian Aset	-	-	-	-	574.649.647,89	(574.649.647,89)	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				(99.569.391.802,00)	(86.775.678.721,89)	(12.793.713.080,11)	12,85

3.3.2.1 Beban Operasional

Beban Operasional – LO terdiri dari:

3.3.2.1.a Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 19.866.234.646,00 tidak sama jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 19.166.076.854,00 atau naik sebesar Rp. 700.157.792,00 yang disebabkan adanya penambahan sebesar Rp. 1.605.404.210,00 dan pengurangan sebesar Rp. 905.246.418,00 dari pelunasan utang tahun lalu yang sudah menjadi beban tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH Beban LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Pegawai	19.166.076.854,00	1.605.404.210,00	905.246.418,00	19.866.234.646,00	18.874.714.159,00	991.520.487,00	4,99
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.983.470.714,00	40.093.772,00	20.422.628,00	9.003.141.858,00	9.145.872.906,00	(142.731.048,00)	(1,59)
Beban Gaji Pokok ASN	6.572.384.000,00			6.572.384.000,00	6.675.494.000,00	(103.110.000,00)	(1,57)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	641.404.172,00			641.404.172,00	662.690.196,00	(21.286.024,00)	(3,32)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	522.680.000,00			522.680.000,00	526.550.000,00	(3.870.000,00)	(0,74)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	54.240.000,00			54.240.000,00	26.068.000,00	28.172.000,00	51,94
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	229.500.000,00			229.500.000,00	242.990.000,00	(13.490.000,00)	(5,88)
Beban Tunjangan Beras ASN	395.268.360,00			395.268.360,00	415.980.480,00	(20.712.120,00)	(5,24)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.938.090,00			14.938.090,00	13.704.081,00	1.234.009,00	8,26
Beban Pembulatan Gaji ASN	97.387,00			97.387,00	96.169,00	1.218,00	1,25
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	499.201.403,00	40.093.772,00	20.422.628,00	518.872.547,00	527.524.094,00	(8.651.547,00)	(1,67)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.439.297,00			13.439.297,00	13.693.933,00	(254.636,00)	(1,89)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	40.318.005,00			40.318.005,00	41.081.953,00	(763.948,00)	(1,89)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.891.201.294,00	1.499.925.800,00	738.813.300,00	9.652.313.794,00	8.936.052.225,00	716.261.569,00	7,42
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.452.748.000,00	585.942.000,00	252.802.000,00	3.785.888.000,00	2.687.294.284,00	1.098.593.716,00	29,02
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	906.347.500,00	164.616.000,00	42.062.000,00	1.028.901.500,00	1.396.928.336,00	(368.026.836,00)	(35,77)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.532.105.794,00	749.367.800,00	443.949.300,00	4.837.524.294,00	4.851.829.605,00	(14.305.311,00)	(0,30)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.440.000,00	0,00	0,00	11.440.000,00	21.520.000,00	(10.080.000,00)	(88,11)
Beban Honorarium	11.440.000,00			11.440.000,00	21.520.000,00	(10.080.000,00)	(88,11)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	171.710.511,00	0,00	0,00	171.710.511,00	171.269.028,00	441.483,00	0,26
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00			54.600.000,00	54.600.000,00	-	-

Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000,00			6.468.000,00	6.468.000,00	-	-
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00			98.280.000,00	98.280.000,00	-	-
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.648.760,00			5.648.760,00	5.214.240,00	434.520,00	7,69
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	800.311,00			800.311,00	793.428,00	6.883,00	0,86
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	800,00			800,00	720,00	80,00	10,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.463.360,00			5.463.360,00	5.463.360,00	-	-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00			112.320,00	112.320,00	-	-
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00			336.960,00	336.960,00	-	-
Beban Insentif Bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah	492.177.965,00	44.221.651,00	146.010.490,00	390.389.126,00	0,00	390.389.126,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.765.532,00	1.208.009,00	935.404,00	4.038.137,00	-	4.038.137,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	36.871.864,00	15.906.708,00	13.501.356,00	39.277.216,00	-	39.277.216,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	770.497,00	239.203,00	313.642,00	696.058,00	-	696.058,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	7.393.587,00	9.482.533,00	7.393.587,00	9.482.533,00	-	9.482.533,00	-
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	244.604.250,00	-	74.307.375,00	170.296.875,00	-	170.296.875,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	611.696,00	226.361,00	143.756,00	694.301,00	-	694.301,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	575.707,00	278.876,00	139.760,00	714.823,00	-	714.823,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	6.546,00	4.961,00	1.038,00	10.469,00	-	10.469,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	157.738.286,00	-	39.434.572,00	118.303.714,00	-	118.303.714,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	39.840.000,00	16.875.000,00	9.840.000,00	46.875.000,00	-	46.875.000,00	100,00
Beban Insentif Bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah	16.076.370,00	21.162.987,00	0,00	37.239.357,00	0,00	37.239.357,00	100,00
Beban Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.970.000,00	4.189.102,00		7.159.102,00	-	7.159.102,00	100,00

Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.149.427,00	1.346.645,00		4.496.072,00	-	4.496.072,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	2.664.915,00		2.664.915,00	-	2.664.915,00	-
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	2.762.598,00	2.775.000,00		5.537.598,00	-	5.537.598,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	-	6.000.000,00		6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.575.000,00	4.187.325,00		5.762.325,00	-	5.762.325,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.619.345,00			5.619.345,00	-	5.619.345,00	100,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	-			-	-	-	-
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	-			-	-	-	-
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	-			-	-	-	-
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-			-	-	-	-
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	-			-	-	-	-
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	-			-	-	-	-
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00			600.000.000,00	600.000.000,00	-	-

Perbandingan Beban Pegawai sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik. 3.6
Perbandingan Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



3.3.2.1.b Beban Barang - LO

Realisasi Beban Barang-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.632.643.701,00 tidak sama jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.651.975.901,00 atau turun sebesar Rp. 19.332.200,00 yang disebabkan adanya penambahan sebesar Rp. 2.109.000,00 dan pengurangan sebesar Rp. 21.441.200,00 disebabkan adanya pengurangan dari belanja barang yang diakui menjadi menjadi kas persediaan dan belanja modal yang direklas menjadi belanja barang.

Rincian Beban Barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.632.643.701,00 sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	%
Beban Barang	10.651.975.901,00	2.109.000,00	21.441.200,00	10.632.643.701,00	9.823.536.816,00	809.106.885,00	7,61
Beban Barang	10.651.975.901,00	2.109.000,00	21.441.200,00	10.632.643.701,00	9.823.536.816,00	809.106.885,00	7,61
Beban Barang Pakai Habis	10.651.975.901,00	2.109.000,00	21.441.200,00	10.632.643.701,00	9.812.646.816,00	819.996.885,00	7,71
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.428.448,00			11.428.448,00	0,00	11.428.448,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	20.878.900,00			20.878.900,00	4.960.800,00	15.918.100,00	76,24

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.864.997.000,00			1.864.997.000,00	1.424.354.706,00	440.642.294,00	23,63
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	33.165.000,00			33.165.000,00	22.185.000,00	10.980.000,00	33,11
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	180.191.000,00			180.191.000,00	194.821.500,00	(14.630.500,00)	(8,12)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	386.056.500,00	2.109.000,00		388.165.500,00	121.798.900,00	266.366.600,00	68,62
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00			0,00	71.995.681,00	(71.995.681,00)	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.559.694.450,00		21.441.200,00	1.538.253.250,00	421.053.058,00	1.117.200.192,00	72,63
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00			0,00	20.340.000,00	(20.340.000,00)	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00			0,00	896.661.250,00	(896.661.250,00)	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100.910.000,00			100.910.000,00	86.005.000,00	14.905.000,00	14,77
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	497.502.688,00			497.502.688,00	496.357.315,00	1.145.373,00	0,23
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	143.443.221,00			143.443.221,00	223.299.386,00	(79.856.165,00)	(55,67)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	478.013.934,00			478.013.934,00	46.125.000,00	431.888.934,00	90,35
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	119.000.000,00			119.000.000,00	256.150.000,00	(137.150.000,00)	(115,25)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.408.260,00			12.408.260,00	106.077.270,00	(93.669.010,00)	(754,89)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.168.327.750,00			1.168.327.750,00	587.647.565,00	580.680.185,00	49,70
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.068.393.750,00			2.068.393.750,00	2.194.168.075,00	(125.774.325,00)	(6,08)
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.706.715.000,00			1.706.715.000,00	1.722.041.200,00	(15.326.200,00)	(0,90)
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00			0,00	181.930.110,00	(181.930.110,00)	-
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	18.000.000,00			18.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	55,56
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	88.000.000,00			88.000.000,00	56.000.000,00	32.000.000,00	36,36
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.450.000,00			31.450.000,00	55.150.000,00	(23.700.000,00)	(75,36)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00			0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	28.000.000,00			28.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	42,86
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	58.000.000,00			58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	100,00
Belanja Pakaian KORPRI	0,00			0,00	5.250.000,00	(5.250.000,00)	-
Belanja Pakaian Adat Daerah	48.000.000,00			48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00			0,00	6.750.000,00	(6.750.000,00)	-
Belanja Pakaian Olahraga	29.400.000,00			29.400.000,00	533.525.000,00	(504.125.000,00)	(1.714,71)
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890.000,00	(10.890.000,00)	-

Perbandingan Beban Persediaan sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik. 3.7
Perbandingan Beban Barang
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



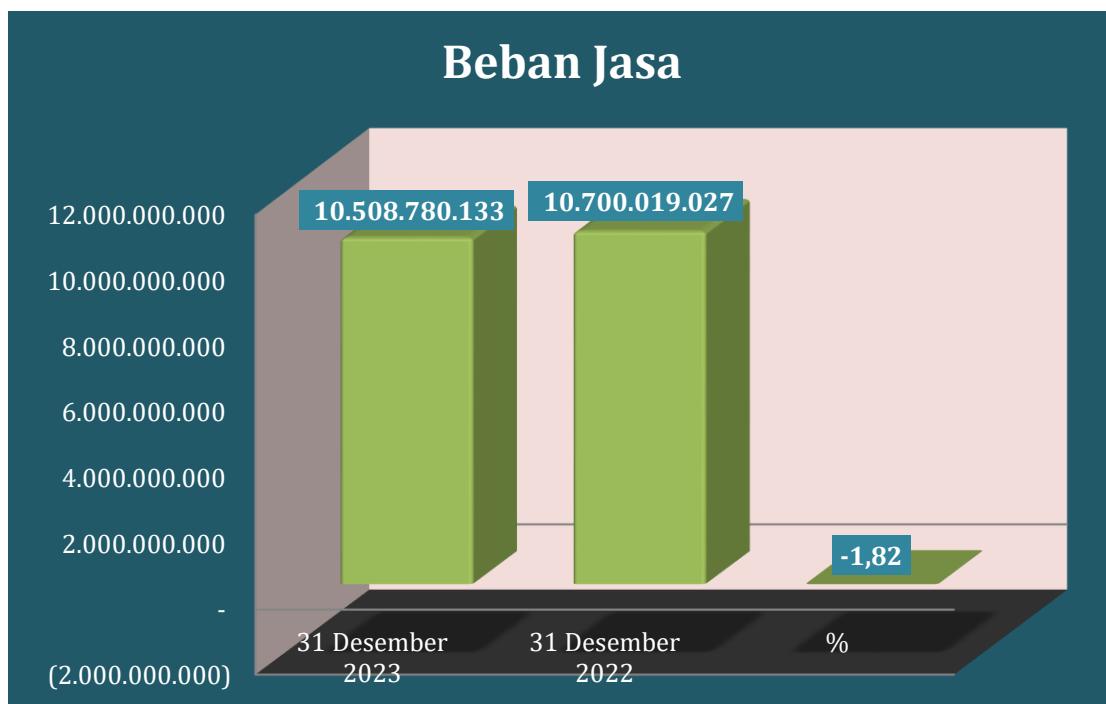
3.3.2.1.c Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 10.508.780.133,00 atau lebih kecil Rp. 58.506.164,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jasa-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.567.286.297,00 yang disebabkan adanya penambahan utang jasa kantor bulan Desember 2023 yang dibayar bulan Januari 2024, penambahan beban sewa dibayar dimuka sewa gedung bangunan dan pengurangan karena pelunasan utang jasa kantor tahun lalu dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH BEBAN LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BebanJasa	10.567.286.297,00	80.543.479,00	139.049.643,00	10.508.780.133,00	10.700.019.027,00	(191.238.894,00)	(1,82)
Beban Jasa	10.567.286.297,00	80.543.479,00	139.049.643,00	10.508.780.133,00	10.700.019.027,00	(191.238.894,00)	(1,82)
Belanja Jasa Kantor	8.887.911.434,00	70.870.528,00	67.049.643,00	8.891.732.319,00	8.507.389.027,00	384.343.292,00	4,32
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	112.680.000,00	0,00	0,00	112.680.000,00	121.260.000,00	(8.580.000,00)	(7,61)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.061.287.613,00	0,00	0,00	1.061.287.613,00	767.970.000,00	293.317.613,00	27,64
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	320.737.800,00	0,00	72.000.000,00	248.737.800,00	403.045.000,00	(154.307.200,00)	(62,04)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.983.450,00	0,00	0,00	24.983.450,00	82.398.000,00	(57.414.550,00)	(229,81)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	701.099.000,00	(701.099.000,00)	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	159.686.000,00	0,00	0,00	159.686.000,00	116.858.000,00	42.828.000,00	26,82

Perbandingan Beban Jasa sebagaimana tercantum dalam diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik. 3.8
Perbandingan Beban Jasa
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



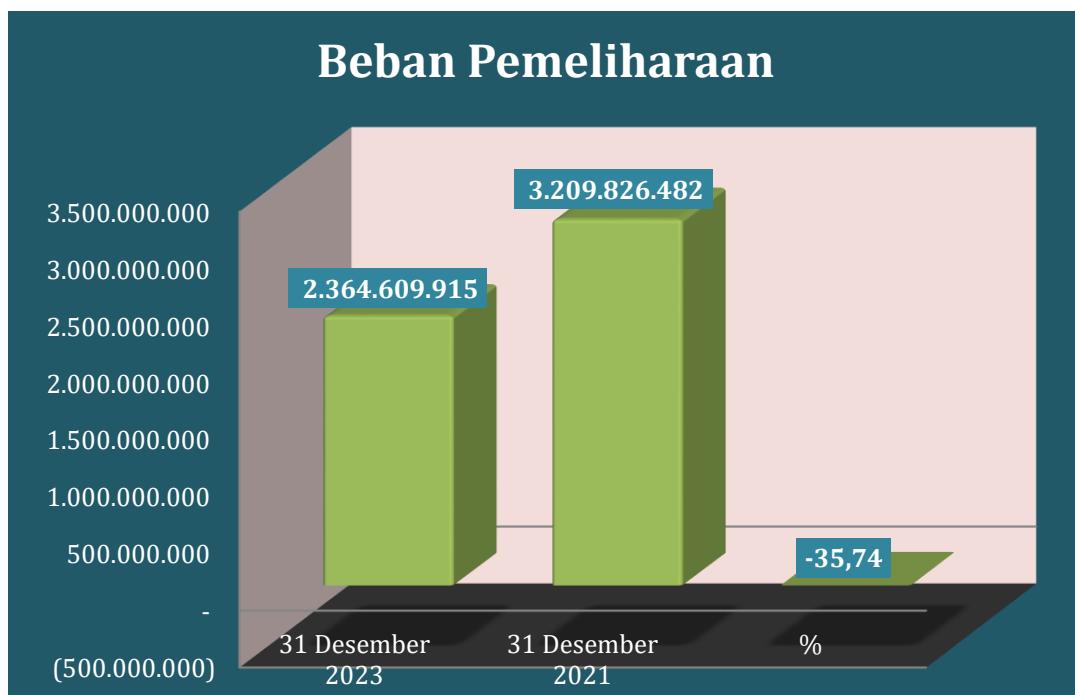
3.3.2.1.d Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.364.609.915,00 atau sama dengan realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 2.364.609.915,00,00 disebabkan tidak adanya transaksi pelunasan maupun penambahan utang belanja pemeliharaan selama tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Pemeliharaan	2.364.609.915,00	0,00	0,00	2.364.609.915,00	3.209.826.482,00	(845.216.567,00)	(35,74)
Beban Pemeliharaan	2.364.609.915,00	0,00	0,00	2.364.609.915,00	3.209.826.482,00	(845.216.567,00)	(35,74)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.655.690.700,00	0,00	0,00	1.655.690.700,00	1.719.070.000,00	(63.379.300,00)	(3,83)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	645.927.000,00	0,00	0,00	645.927.000,00	1.401.759.272,00	(755.832.272,00)	(117,02)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.992.215,00	0,00	0,00	62.992.215,00	88.997.210,00	(26.004.995,00)	(41,28)

Perbandingan Beban Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik. 3.9
Perbandingan Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



3.3.2.1.e Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.374.591.566,00 atau sama dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.374.591.566,00 disebabkan tidak adanya transaksi pelunasan maupun penambahan utang belanja perjalanan dinas selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Barang dan Jasa	5.374.591.566,00	0,00	0,00	5.374.591.566,00	3.479.715.825,00	1.894.875.741,00	35,26
Beban Perjalanan Dinas	5.374.591.566,00	0,00	0,00	5.374.591.566,00	3.479.715.825,00	1.894.875.741,00	35,26
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.374.591.566,00	0,00	0,00	5.374.591.566,00	3.479.715.825,00	1.894.875.741,00	35,26
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-			0,00	-	-	-

Perbandingan Beban Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam tabel 5.10 dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik. 3.10
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



3.3.2.1.f Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp 320.000.000,00 atau sama dengan realisasi Belanja Hibah-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 320.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	380.000.000,00	(60.000.000,00)	(18,75)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	380.000.000,00	(60.000.000,00)	(18,75)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	380.000.000,00	(60.000.000,00)	(18,75)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	380.000.000,00	(60.000.000,00)	(18,75)

Perbandingan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik. 3.11
Perbandingan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



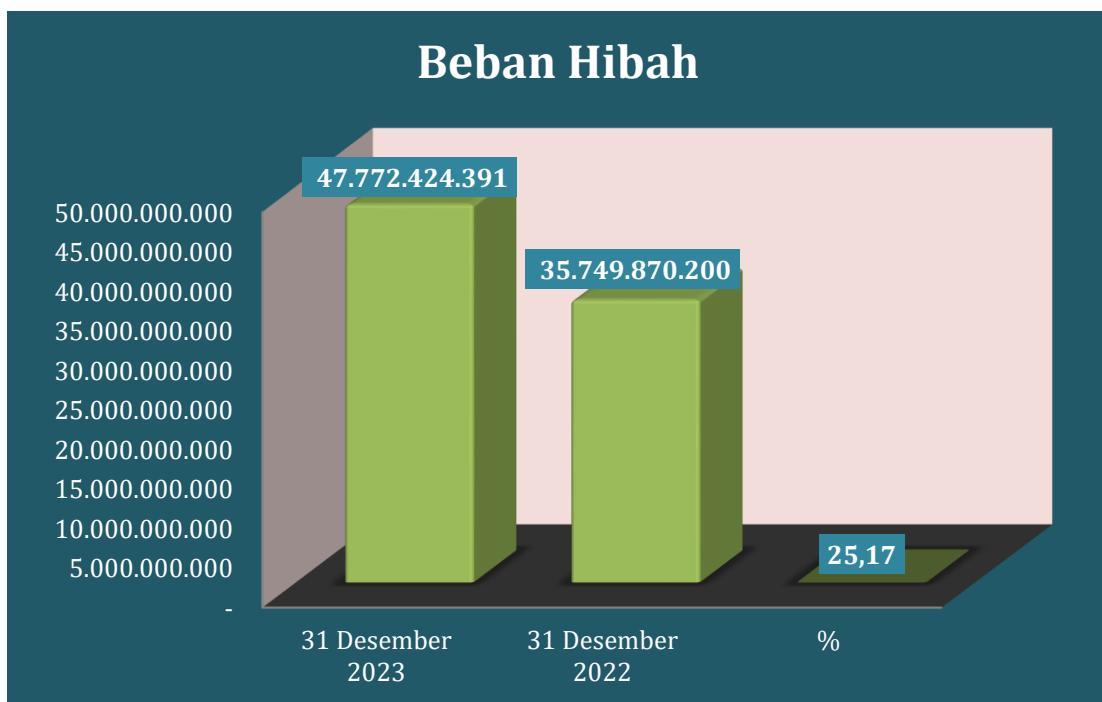
3.3.2.1.g Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 47.772.424.391,00 atau sama dengan realisasi Belanja Hibah-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 47.772.424.391,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH Beban LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Hibah	47.380.500.000,00	0,00	391.924.391,00	47.772.424.391,00	35.749.870.200,00	12.022.554.191,00	25,17
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	47.672.424.391,00	0,00	0,00	47.672.424.391,00	35.649.870.200,00	12.022.554.191,00	25,22
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.280.500.000,00	0,00	0,00	47.280.500.000,00	35.649.870.200,00	11.630.629.800,00	32,62
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	391.924.391,00	0,00	0,00	0	0,00	391.924.391,00	-

Perbandingan Beban hibah sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik. 3.12
Perbandingan Beban Hibah
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



3.3.2.1.h Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.730.107.450,00 sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi yang sistematis atas nilai satu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban dalam tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	2.730.107.450,00	0,00	2.730.107.450,00	3.894.936.749,00	(1.164.829.299,00)	(42,67)
Beban Penyusutan Aset Tetap	0,00	2.718.064.450,00	0,00	2.718.064.450,00	3.871.385.137,00	(1.153.320.687,00)	(42,43)
Beban penyusutan peralatan mesin	0,00	2.178.749.721,00	0,00	2.178.749.721,00	2.139.334.398,00	39.415.323,00	1,81
Beban penyusutan gedung dan bangunan	0,00	368.622.261,00	0,00	368.622.261,00	858.079.903,00	(489.457.642,00)	(132,78)
Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	0,00	137.285.468,00	0,00	137.285.468,00	663.772.659,00	(526.487.191,00)	(383,50)
Beban penyusutan aset tetap lainnya	0,00	33.407.000,00	0,00	33.407.000,00	210.198.177,00	(176.791.177,00)	(529,20)
Beban Amortisasi Aset Tak berwujud	0,00	12.043.000,00	0,00	12.043.000,00	23.551.612,00	(11.508.612,00)	(95,56)
Beban Amortisasi Aset Tak berwujud	0,00	12.043.000,00	0,00	12.043.000,00	23.551.612,00	(11.508.612,00)	(95,56)

Grafik. 3.13
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



3.3.2.1.i Beban Lain-Lain

Realisasi Beban Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 sama dengan Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena beban penurunan nilai merupakan alokasi yang sistematis atas beban penurunan nilai satu aset yang di reklass menjadi asset ekstracomptable. Nilai beban penurunan nilai untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban dalam tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	-2.430.000,00	0,00
Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	-2.430.000,00	0,00
Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	-2.430.000,00	0,00

Grafik. 3.14
Perbandingan Beban Lain-Lain
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

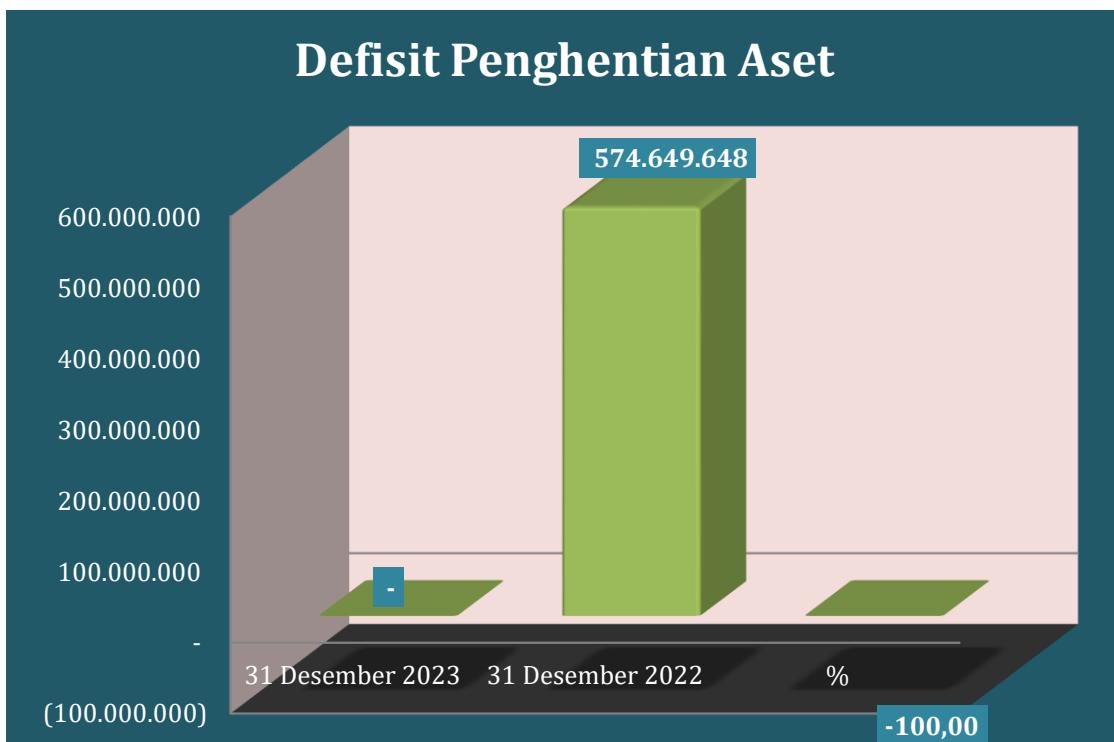


3.3.2.1.j Defisit Penghentian Aset

Realisasi Defisit Non Operasional-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin. Nilai Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin ini merupakan sisa nilai buku dari aset yang rusak berat dan sudah dihapuskan sesuai dengan SK Bupati Ciamis tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Defisit non operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	574.649.647,89	(574.649.647,89)	(100,00)
Defisit non operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	574.649.647,89	(574.649.647,89)	(100,00)
Defisit Penghentian aset gedung dan bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	530.983.838,89	(530.983.838,89)	(100,00)
Defisit penghentian Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	43.665.809,00	(43.665.809,00)	(100,00)

Grafik. 3.13
Perbandingan Beban Lain-Lain
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



3.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Sekretariat Daerah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Sekretariat Daerah per 31 Desember 2023 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 21.246.328.924,99. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp. 21.246.328.924,99 diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp. 56.308.324.848,28; RK PPKD sebesar Rp. 96.199.144.403,00; RK PPKD Barang (Rp. 31.691.748.524,29) dan dikurangi surplus/Defisit-LO sebesar (Rp. 99.569.391.802,00) sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp. 21.246.328.924,99,09. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

3.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal per 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 56.308.324.848,28. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas Neraca per 31 Desember 2022 (*audited*) yang terdiri atas :

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	56.308.324.848,28	49.948.132.279,87
Surplus/Defisit-LO	-99.569.391.802,00	-86.775.678.722,13
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	93.500.792,88
RK PPKD	96.199.144.403,00	83.510.600.481,00
RK Barang	-31.691.748.524,29	9.531.770.016,66
JUMLAH EKUITAS AKHIR	21.246.328.924,99	56.308.324.848,28

3.4.2 RK PPKD

Nilai RK PPKD untuk periode per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 96.199.144.403,00 dan sebesar Rp. 83.510.600.481,00. RK PPKD berasal dari jumlah SP2D yang diterima dikurangi dengan pendapatan dan pengembalian (CP) yang disetorkan ke Kas Daerah. Adapun perincian RK PPKD per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 96.199.144.403,00,00 sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022
Uang Muka dari BUD	96.329.139.137,00	83.736.873.550,00
Pendapatan yang disetor ke Kas Daerah	0	0
Pengembalian ke Kas Daerah (CP)	-129.994.734,00	-226.273.069,00
Dampak Kumulatif - utang Beban barang dan jasa	0	0
RK PPKD	96.199.144.403,00	83.510.600.481,00

3.4.3 RK PPKD Barang

Nilai RK PPKD Barang merupakan perincian mutasi masuk dan keluar aset antar SKPD. Adapun RK barang periode per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. (31.691.748.524,29) dan Rp. 9.531.770.016,66. RK barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (31.691.748.524,29) adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN	JUMLAH
Mutasi dari SKPD lain :	643.532.500,00	0,00	643.532.500,00
PERALATAN MESIN	643.532.500,00	0,00	643.532.500,00
Toyota Zenyx Q HV CVT TTS (Z 1232 T)	620.537.500	-	620.537.500,00
Sepeda Motor Yamaha MIO GEAR Z 6205 U	19.280.000	-	19.280.000,00
Printer Epson L3211 A4 AIO 2023	3.715.000	-	3.715.000,00

Mutasi ke SKPD lain :	41.028.626.514,29	8.693.345.490,00	32.335.281.024,29
TANAH	6.860.000.000,00	0	6.860.000.000,00
Tanah IC	6.860.000.000,00	0	6.860.000.000,00
PERALATAN MESIN	1.633.299.104,00	1.853.144.118,00	-219.845.014,00
Sepeda Motor @2004	5.800.000,00	5.800.000	0,00
Cermin Besar @2016	1.980.000,00	1.980.000	0,00
Rak-Rak Penyimpan @2016	2.475.000,00	2.475.000	0,00
Lemari Kayu @2006	650.000,00	650.000	0,00
Lemari Kayu @2008	1.500.000,00	1.500.000	0,00
CCTV - @2020	21.555.000,00	9.340.500	12.214.500,00
Alat Kantor Lainnya Lain-Lain @2020	11.200.000,00	4.853.333	6.346.667,00
Hub @2020	2.355.000,00	1.275.626	1.079.374,00
Hub @2020	558.000,00	302.250	255.750,00
Hub @2020	485.000,00	262.708	222.292,00
Meja Kerja Kayu @2009	4.500.000,00	4.500.000	0,00
Meja Kerja Kayu @2016	7.757.500,00	7.757.500	0,00
Sice @2016	4.950.000,00	4.950.000	0,00
Sice @2016	3.465.000,00	3.465.000	0,00
Meja Rapat @2009	650.000,00	650.000	0,00
Meja Rapat @2016	3.410.000,00	3.410.000	0,00
Meja Rapat @2016	5.940.000,00	5.940.000	0,00
Meja Tambahan @2005	385.000,00	385.000	0,00
Kursi Rapat @2016	7.370.000,00	7.370.000	0,00
Meja Biro @2013	2.300.000,00	2.300.000	0,00
Dinding/ Sekat Kayu @2022	42.195.540,00	1.406.518	40.789.022,00
Mesin Pemotong Rumput @2019	4.520.000,00	2.862.666	1.657.334,00
AC Split @2006	18.750.000,00	18.750.000	0,00
AC Split @2008	363.712.600,00	363.712.600	0,00
AC Split @2016	13.983.526,00	13.983.526	0,00
AC Split @2016	98.249.472,00	98.249.472	0,00
Televisi @2019	825.000,00	825.000	0,00
Televisi @2010	1.380.000,00	1.380.000	0,00
Loudspeaker @2006	31.040.000,00	31.040.000	0,00
Loudspeaker @2014	9.000.000,00	9.000.000	0,00
Sound system @2006	87.675.000,00	87.675.000	0,00
Microphone Floor Stand @2006	7.390.000,00	7.390.000	0,00
Dispenser @2011	500.000,00	500.000	0,00
Gordyn/ Kray @2016	25.428.211,00	25.428.211	0,00
Gordyn/ Kray @2016	40.692.926,00	40.692.926	0,00
Gordyn/ Kray @2016	92.819.644,00	92.819.644	0,00
Bracket standing @2006	1.330.000,00	1.330.000	0,00
Lampu Hias @2005	6.250.000,00	6.250.000	0,00
Alat Pemadam Kebakaran @2022	11.250.000,00	1.874.997	9.375.003,00
Kursi Kerja Pehawai Non Struktural @2009	2.400.000,00	2.400.000	0,00
Kursi Kerja Pehawai Non Struktural @2016	6.187.500,00	6.187.500	0,00
Lemari Buku Arsip Dinamis @2016	7.975.000,00	7.975.000	0,00
Digital Audio Taperecorder @2006	1.427.000,00	1.427.000	0,00

PC Unit @2007	4.500.000,00	4.500.000	0,00
PC Unit @2019	4.472.000,00	3.447.167	1.024.833,00
Printer @2019	2.409.000,00	1.856.938	552.062,00
Printer @2014	1.900.000,00	1.900.000	0,00
Mobil Toyota Innova (Z 1070 T) ke BPKD	435.750.185,00	337.187.643	98.562.542,00
Toyota kijang innova G Z 399 T	220.001.000,00	220.001.000	0,00
Hibah Nissan X Trail 2,5 CVT ST AT Z 1042 T	0,00	391.924.393	-391.924.393
GEDUNG DAN BANGUNAN	29.648.860.460,29	5.552.579.855,00	24.096.280.605,29
Bangunan Gedung Kantor Permanen	549.826.000,00	143.871.137	405.954.863,00
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	187.058.850,00	5.300.001	181.758.849,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	895.000.000,00	234.191.667	660.808.333,00
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	7.031.440.630,00	2.402.408.882	4.629.031.748,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	473.381.000,00	114.400.408	358.980.592,00
Asrama Permanen	12.969.075.033,00	1.695.986.245	11.273.088.788,00
Asrama Permanen	4.972.619.747,29	815.873.406	4.156.746.341,29
Pagar Permanen	2.521.134.700,00	129.614.511	2.391.520.189,00
Pintu Pagar	49.324.500,00	10.933.598	38.390.902,00
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	2.886.466.950,00	1.287.621.517,00	1.598.845.433,00
Jln Khusus Pejalan Kaki	475.983.000,00	162.627.525	313.355.475,00
Jln Khusus Lingkungan	2.333.346.950,00	1.089.421.767	1.243.925.183,00
Jln Khusus Khusus Lingkungan	25.000.000,00	25.000.000	0
Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya	52.137.000,00	10.572.225	41.564.775,00
RK BARANG			-31.691.748.524,29

3.4.4 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah defisit sebesar (99.588.237.973,00) dan Rp. (86.775.678.722,13). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara jumlah pendapatan, surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BEBAN	PENGURANGA N HUTANG BEBAN	LO 2023	LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
PENDAPATAN- LO	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain PAD Yang Sah - LO (Setoran piutang macet)	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN DAERAH - LO	96.216.964.924,00	4.418.164.139,00	1.065.737.261,00	99.569.391.802,00	86.112.619.258,00	13.456.772.544,00	13,51
BEBAN OPERASI	96.216.964.924,00	4.418.164.139,00	1.065.737.261,00	99.569.391.802,00	86.112.619.258,00	13.456.772.544,00	13,51
Beban Pegawai	19.166.076.854,00	1.605.404.210,00	905.246.418,00	19.866.234.646,00	18.874.714.159,00	991.520.487,00	4,99
Beban Barang	10.651.975.901,00	2.109.000,00	21.441.200,00	10.632.643.701,00	9.823.536.816,00	809.106.885,00	7,61

Beban Jasa	10.567.286.297,00	80.543.479,00	139.049.643,00	10.508.780.133,00	10.700.019.027,00	(191.238.894,00)	(1,82)
Beban Pemeliharaan	2.364.609.915,00	-	-	2.364.609.915,00	3.209.826.482,00	(845.216.567,00)	(35,74)
Beban Perjalanan Dinas	5.374.591.566,00	-	-	5.374.591.566,00	3.479.715.825,00	1.894.875.741,00	35,26
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	320.000.000,00	-	-	320.000.000,00	380.000.000,00	(60.000.000,00)	(18,75)
Beban Hibah	47.772.424.391,00	-	-	47.772.424.391,00	35.749.870.200,00	12.022.554.191,00	25,17
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	2.730.107.450,00	-	2.730.107.450,00	3.894.936.749,00	(1.164.829.299,00)	(42,67)
BEBAN LAIN-LAIN	-	-	-	-	85.979.816,00	(85.979.816,00)	100,00
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	85.979.816,00	(85.979.816,00)	100,00
BEBAN PENURUNAN NILAI INVESTASI	-	-	-	-	2.430.000,00	(2.430.000,00)	100,00
Beban Penurunan Nilai (Ekstracomptable Tahun Berjalan	-	-	-	-	2.430.000,00	(2.430.000,00)	100,00
Defisit Non Operasional	-	-	-	-	574.649.647,89	-	-
Defisit Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Defisit penghentian Aset	-	-	-	-	574.649.647,89	(574.649.647,89)	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				(99.569.391.802,00)	(86.775.678.721,89)	(12.793.713.080,11)	12,85

3.4.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. 21.246.328.924,99 dan Rp. 56.308.324.848,28. Adapun perincian ekuitas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 21.988.050.868,09 sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	56.308.324.848,28	49.948.132.279,87
Surplus/Defisit-LO	(99.569.391.802,00)	(86.775.678.722,13)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	93.500.792,88
- Dampak Kumulatif – Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	0,00	(9.277.641,12)
- Dampak Kumulatif – Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	77.183.452,00
- Dampak Kumulatif – Akumulasi Aset Tetap Lainnya	0,00	(176.791.177,00)
- Dampak Kumulatif – Penyisihan Piutang	0,00	202.386.159,00
RK PPKD	96.199.144.403,00	83.510.600.481,00
RK Barang	(31.691.748.524,29)	9.531.770.016,66
JUMLAH EKUITAS AKHIR	21.246.328.924,99	56.308.324.848,28

4.1 Kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan unsur staf yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh Perangkat Daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah maka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah harus mampu mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat dan kemajuan sistem informasi serta teknologi dengan menciptakan suatu pola organisasi yang efektif. Sejalan dengan paradigm pemerintahan yang berkembang saat ini, maka perlu dilakukan upaya dalam menyiapkan tuntutan perubahan struktur maupun kultur, untuk itu Sekretariat Daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Sebagai konsekuensi kondisi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan sekaligus merumuskan kebijakan pemerintah daerah perlu menyelaraskan kegiatan-kegiatannya sejalan dengan berbagai upaya/tahapan guna mencapai visi Kabupaten Ciamis.

4.2 Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2021 bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Daerah dibantu oleh :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum.

Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

4.3 Fungsi

Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.4 Struktur Organisasi

Selanjutnya berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama, membawahkan :
 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 5. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 7. Bagian Umum, membawahkan :
 8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 9. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
 10. Bagian Organisasi, membawahkan :
 11. Kelompok Jabatan Fungsional

4.5 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dalam Operasionalisasinya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian. Kondisi sumber daya manusia lingkup Sekretariat Daerah terdiri dari:

Tabel 4.1.
Kondisi Pegawai Setda Kabupaten Ciamis
Per 31 Desember 2023

No	Unit Kerja	Jumlah		Total
		L	P	
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Staf Ahli	2	1	3
3	Asisten	3	-	3
4	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama	4	3	7
5	Bagian Hukum	6	2	8
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	2	9
8	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	1	4
9	Bagian Administrasi Pembangunan	3	2	5
10	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	12	1	13
11	Bagian Organisasi	4	4	8
12	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	2	7
13	Bagian Umum	31	17	48
14	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9	3	12
JUMLAH		90	38	128

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pangkat/golongan/ruang sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Kondisi Pegawai Setda Kab. Ciamis
Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2023

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Struktural	15	4	19
2	Fungsional	20	7	27
3	Pelaksana	55	27	82
	Jumlah	90	38	128

Selanjutnya kondisi kepegawaian lingkup Setda Kabupaten Ciamis berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Kondisi Pegawai Setda Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	SD	1	-	1
2	SLTP	2	-	2
3	SLTA	25	7	32
4	D I	-	-	-
5	D II	-	-	-
6	D III	1	1	2
7	D IV	6	2	8
8	S 1	34	20	54
9	S 2	19	7	26
10	S 3	2	1	3
JUMLAH		90	38	128

Kondisi pegawai berdasarkan eselonering sebagai berikut :

Tabel 4.4
Kondisi Pegawai Setda KabupatenCiamis
Berdasarkan Rentang Usia Per 31 Desember 2023

No	Eselon	Jumlah		Juml ah
		L	P	
1	Generasi Baby Boomers (diatas 58 Tahun)	10	5	15
2	Generasi X (42 - 57)	51	19	70
3	Generasi Y milenial (26 - 41)	26	13	39
4	Generasi Z (dibawah 26 Tahun)	3	1	4
JUMLAH		90	38	128

4.6 Hal Lain yang Dianggap Penting

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Disiplin ilmu yang dimiliki dan kompetensi kerja sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, sehingga para pegawai bisa bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Dacrah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 yang disusun dengan mengacu pada dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, sesuai tata kelola sistem keuangan pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis/ Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ciamis, 31 Januari 2023

